

**PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR
(PIP) JENJANG SMP DI KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

TESIS

**Diajukan guna memperoleh Gelar Magister Ilmu Pemerintahan
Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara**



Diajukan Oleh

**IWAN SYAHRONI
NPM :20651010228**

**PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI ILMU PEMERINTAHAN
ABDI NEGARA**

2023



KOREKSI PENGUJI

NO
Dokumen :
Tanggal
Terbit :
Revisi :

Nama : Iwan Syahroni

NPM : 20651010228

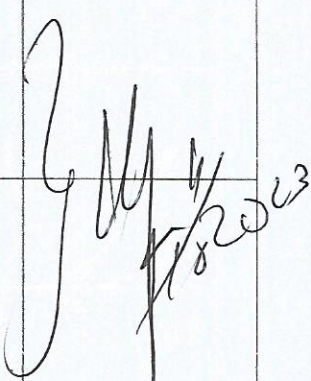
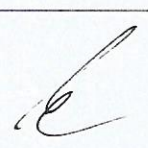
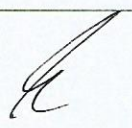
Angkatan/Kelas : XII B

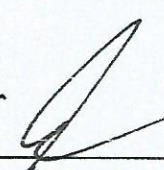
Program Studi : MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

Judul : PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM
INDONESIA PINTAR (PIP) JENJANG SMP DI KABUPATEN
BEKASI PROVINSI JAWA BARAT

Tanggal SUP : 3 Oktober 2023

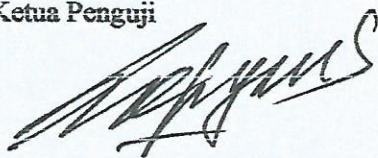
NO	Pembimbing/Penguji	Halaman Perbaikan	Saran Pembimbing/Penguji	Status Perbaikan	Paraf
1	Prof.Dr.I.Nyoman. Sumaryadi. BA, M.Si	iv	Abstrak harus ada saran		
		10	Rumusan masalah disederhanakan	Rumusan masalah dari 5 menjadi 3	
		71	Halaman 71 terbalik	Sudah diperbaiki	
		lampiran	Hasil Wawancara dilengkapi	Hasil wawancara sudah dilengkapi	
			Semua Saran dari penguji untuk perbaikan	Semua saran sudah diperbaiki	
2	Dr. Drs. Rajaner P. Simarmata.,M.Si	10	Perbaiki rumusan masalah	Rumusan masalah sudah sesuai RUP	
		80 - 99	Konsisten dengan pembahasan di Bab 4	Rumusan masalah sudah sesuai	

2	Dr. Drs. Rajaner P. Simarmata.,M.Si	Perbaiki rumusan masalah	10	Rumusan masalah sudah sesuai RUP	
		Konsisten dengan pembahasan di Bab 4	80 - 99	Rumusan masalah sudah sesuai pembahasan di BAB 4	
3	Dr. Sumarsono. MDM	Tujuan penelitian	11	Tujuan penelitian sudah diperbaharui sesuai rumusan masalah	
		Penyimpulan dan saran-saran buat lebih realistis	108	Kesimpulan dan saran sesuai dengan kenyataan dan kondisi Dinas Pendidikan	
4	Dr. Drs. Sofyan Safari Hamim. M.Si	Pengetikan spasi judul pengesahan	ii	Pengetikan sudah sesuai aturan pedoman penulisan Tesis STIPAN	
		Abstrak kata kunci	iv	Kata kunci di Abstrak sudah disesuaikan	
		Daftar isi halaman	ix	Daftar isi sudah pakai kata halaman	
		Perumusan maslah dan tujuan penelitian 3 saja		Perumusan masalah	

				sudah 3 dari 5 rumusan	
		Lampirkan Biodata /Daftar Riwayat Hidup		Daftar riwayat hidup sudah dilampirkan di bagian belakang	
		Jadual penelitian jadi satu lembar		Jadual penelitian sudah di sesuaikan menjadi satu lembar	

Persetujuan Oleh Tim Penguji

Ketua Penguji



Dr. Sofyan Safari Hamim, M.Si

Tanggal :

Anggota I



Prof. Dr. Drs. I Nyoman Sumaryadi, BA, M.Si

Tanggal :

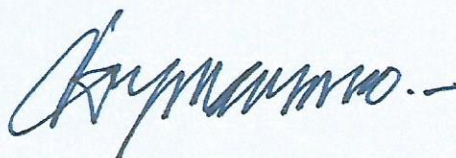
Anggota II



Dr. Drs. Rajanner P. Simarmata, M.Si

Tanggal : 11-10-2027

Penelaah



Tanggal :

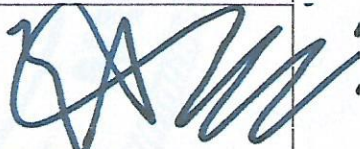
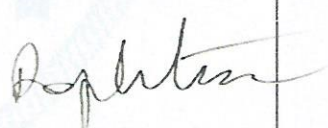
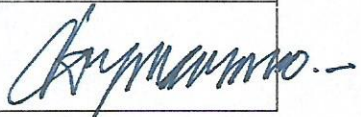
HALAMAN PENGESAHAN TESIS

N a m a : Iwan Syahroni
Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 16 Maret 1079
Nomor Pokok Mahasiwa : 206510102228
Judul Tesis : Peran Dinas Pendidikan Dalam Pelaksanaan
Program Indonesia Pintar (PIP) Jenjang SMP
Di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat

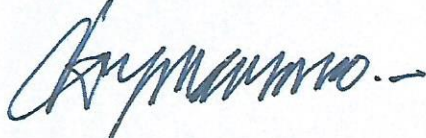
TESIS

Telah dipertahankan dihadapan Tim Dosen Penguji
Pada Hari Selasa, Tanggal 3 Oktober 2023

Tim Dosen Penguji

1.	Dr. Sofyan Safari Hamim, M.Si	Ketua	Tanda Tangan
2.	Prof,Dr.I Nyoman Sumaryadi,BA,M.Si	Anggota 1	
3.	Dr. Drs. Rajanner P. Simarmata, M.Si	Anggota 2	
4.	Dr. Sumarsono,MDM	Penelaah	

Diketahui dan Disahkan Oleh :
Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara
Ketua,



Dr. Sumarsono, MDM

Tanggal :

**PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM
INDONESIA PINTAR (PIP) JENJANG SMP DI KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

Oleh

IWAN SYAHRONI

NPM : 20651010228

TESIS

**Diajukan guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan
Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara**

Diperiksa dan Disetujui oleh

Program Pasca Sarjana

Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan

Abdi Negara

Direktur Akademik

Dr. Drs, Rajanner P. Simarmata, M.Si

Tanggal :

Ketua Program Studi PPs MIP

Dr. Drs, Rosidi, M.Si

Tanggal :

Mengetahui,

Sekolah tinggi Ilmu Pemerintahan

Abdi Negara

Ketua,

Dr. Sumarsono. MDM

Tanggal :

ABSTRAK

PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) JENJANG SMP DI KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT

Oleh:
IWAN SYAHRONI
NPM: 20651010228

Dosen Pembimbing 1,

Dosen Pembimbing 2,

Prof. Dr. Drs. I Nyoman Sumaryadi, BA., M.Si Dr. Rajanner P. Simarmata, M.Si

Permasalahan terkait Program Indonesia Pintar Tahun 2022 yang masih terjadi yaitu masih banyak warga miskin yang belum terdaftar sebagai penerima PIP, pendistribusian dan pencairan dana PIP yang bermasalah, belum tepatnya penggunaan dana PIP. Berbagai masalah tersebut ditemui di berbagai wilayah Kabupaten Bekasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi

Hasil Penelitian Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi sudah melaksanakan perannya dalam pelaksanaan PIP yang mengacu kepada ketentuan pusat dalam Persesjen nomor 14 Tahun 2022, peran Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dalam Pelaksanaan PIP tersebut diantaranya; membuat penganggaran kegiatan sosialisasi tahunan, pembentukan Tim Pengelola PIP Dinas Pendidikan, membuat simpul-simpul pelayanan informasi terkait dengan pelaksanaan PIP dan melakukan monitoring namun masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana yang dikemukakan, maka dari hasil penelitian ini peneliti mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Harus adanya penanggungjawab wilayah per kecamatan terkait keabsahan data calon penerima PIP SMP yang sesuai dengan kriteria pada Persesjen Nomor 14 Tahun 2022
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi harus menambah anggaran dan sumber daya manusia agar dapat memaksimalkan perannya dalam pelaksanaan PIP Jenjang SMP dalam melakukan Sosialisasi dan Koordinasi serta membuat wadah koordinasi dengan Dinas-dinas terkait yang memang mendukung terhadap Pelaksanaan PIP SMP, yang diprakarsai langsung oleh Kepala Dinasnya masing-masing bahkan harus samapai kepada Kepala Daerah Kabupaten Bekasi..
3. Perlu ditambahkan link-link konsultasi serta tim PIP Dinas Pendidikan dalam pelayanan Pengaduan permasalahan PIP dari masyarakat sehingga bisa dengan cepat memberikan penyelesaian .
4. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi harus membuat program pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan PIP Jenjang SMP secara rutin.
5. Harus adanya Tim Advokasi bantuan hukum yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi yang bisa membantu penanganan masalah-masalah hukum dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) Tingkat SMP.

Kata Kunci: Peran, Dinas Pendidikan, Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP), Jenjang SMP dan Kabupaten Bekas

ABSTRACT

THE ROLE OF THE EDUCATION DEPARTMENT IN THE IMPLEMENTATION OF THE INDONESIA SMART PROGRAM (PIP) AT JUNIOR SCHOOL LEVEL IN BEKASI DISTRICT WEST JAVA PROVINCE.

**By:
IWAN SYAHRONI
NPM: 20651010228**

Dosen Pembimbing 1,

Dosen Pembimbing 2,

Prof. Dr. Drs. I Nyoman Sumaryadi, BA., M.Si Dr. Rajanner P. Simarmata, M.Si

Problems related to the 2022 Smart Indonesia Program that are still occurring are that there are still many poor people who have not registered as PIP recipients, the distribution and disbursement of PIP funds is problematic, and the use of PIP funds is not accurate. These various problems were encountered in various areas of Bekasi Regency.

This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. Qualitative research method is a research method based on post-positivism philosophy, used to research the conditions of natural objects, where the researcher is the key instrument, sampling of data sources is carried out purposively and snowballing, data collection techniques are triangulation, data analysis is inductive, and Qualitative research results emphasize meaning rather than generalizations.

Research Results: The Bekasi Regency Education Office has carried out its role in implementing PIP which refers to central provisions in Persesjen number 14 of 2022, the role of the Bekasi Regency Education Office in implementing PIP includes; making a budget for annual socialization activities, forming a PIP Management Team for the Education Service, creating information service nodes related to the implementation of PIP and carrying out monitoring, but there are still several problems in its implementation.

Based on the conclusions as stated, from the results of this research the researcher puts forward the following suggestions:

- 1. There must be a regional person responsible for each sub-district regarding the validity of data on prospective PIP SMP recipients who comply with the criteria in Persesjen Number 14 of 2022*
- 2. The Bekasi Regency Education Office must increase its budget and human resources in order to maximize its role in implementing PIP at the Middle School Level in carrying out Socialization and Coordination as well as creating a coordination forum with the relevant departments that support the Implementation of PIP for Middle Schools, which is initiated directly by the Head of the Department. each of them even had to go to the Regional Head of Bekasi Regency...*
- 3. It is necessary to add consultation links and a PIP team for the Education Service to provide complaints about PIP problems from the public so that they can quickly provide solutions.*
- 4. The Bekasi Regency Education Office must create a program for monitoring and evaluating the implementation of PIP at the junior high school level on a regular basis.*
- 5. There must be a legal aid Advocacy Team formed by the Bekasi Regency Education Office which can help handle legal issues in the implementation of the Smart Indonesia Program (PIP) at the Middle School Level.*

Keywords: Role, Education Department, Implementation of the Smart Indonesia Program (PIP), Middle School Level and Bekasi Regency

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan Usulan Penelitian Tesis dengan Judul “**PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) JENJANG SMP DI KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT**”.

Dengan tersusunnya Usulan Penelitian Tesis ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas bantuan, bimbingan dan dorongan semangat kepada yang terhormat:

1. Bapak **Dr. HM Feisal Tamin** Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Abdi Negara Nusantara;
2. Bapak **Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata SH, MH, MS** Selaku Wakil Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Abdi Negara Nusantara;
3. Bapak **Dr. Sumarsono, MDM** Selaku Ketua STIP-AN yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, semangat serta motivasi kepada penulis sehingga Usulan Penelitian tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya;
4. Bapak **Dr. Sofyan Safari Hamim, M.Si** Wakil Ketua STIP-AN yang selalu memberikan semangat dan mendukung untuk kelancaran Usulan penelitian ini;
5. Bapak **Prof. Dr. Drs. I Nyoman Sumaryadi, BA, M.Si** selaku Pembimbing I yang senantiasa memberi bimbingan dan arahan agar penulisan Usulan Penelitian Tesis ini menjadi lebih baik;
6. Bapak **Dr. Drs. Rajanner P. Simarmata, M.Si** selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara

MIP STIP-AN) dan selaku Pembimbing II yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis;

7. Bapak **Dr. H. Carwinda, M.Si** selaku dosen STIP-AN dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi yang selalu memberikan motivasi, arahan dan bimbingan kepada penulis untuk mengembangkan potensi diri dengan mengambil kuliah Ilmu Pemerintahan sehingga penulis bisa menempuh pendidikan di STIP-AN Jakarta;
8. Para Bapak/ ibu dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (PPs MIP STIP-AN) Jakarta yang telah memberikan ilmu nya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan tepat pada waktunya;
9. Istri dan anak tercinta yang selalu memberikan dukungan dan semangatnya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu;

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Usulan Penelitian Tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak dan semoga dengan tersusunnya Usulan Penelitian Tesis ini dapat memberikan manfaat yang seluas - luasnya.

Atas perhatian, bimbingan dan arahan dari semua pihak penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Wassalam

Bekasi, September 2022

Penulis,

(Iwan.Syahroni)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Permasalahan	9
1.2.1. Identifikasi Masalah	9
1.2.2. Pembatasan Masalah	10
1.2.3. Perumusan Masalah	10
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR	
2.1. Landasan Teoritis.....	12
2.1.1. Teori Peran.....	12
2.1.2. Teori Pemerintahan	23
2.1.3. Kapasitas Organisasi	33
2.1.4. Dinas Pendidikan Kabupaten	41
2.1.5. Pendidikan Dalam Kebijakan Publik	46
2.1.6. Kemiskinan sebagai Penghambat Aksesibilitas Pendidikan	50

2.1.7. Program Indonesia Pintar (PIP)	53
2.2. Hasil Penelitian Sebelumnya	60
2.3. Kerangka Pemikiran	64
2.4. Hipotesis.....	66
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Desain Penelitian	67
3.2. Ruang Lingkup Operasional Penelitian	71
3.3. Sumber Data Penelitian	72
3.4. Informan Penelitian	73
3.5. Teknik Analisis Data.....	74
3.6. Lokasi Penelitian dan Jadwal Penelitian	76
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	79
4.1.1. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi	79
4.1.2. Visi dan Misi Dinas Pendidikan.....	81
4.1.3. Struktur Organisasi.....	83
4.2. Hasil Penelitian	99
4.2.1. Gambaran Peran Dinas Pendidikan Dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Bekasi	99
4.2.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) Jenjang SMP di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat	101
4.2.3. Strategi Peningkatan Peran yang sudah dilaksanakan Dinas Pendidikan dalam Pelaksanaan PIP Jenjang SMP di Kabupaten Bekasi	103
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	107

5.2. Saran	113
------------------	-----

DAFTAR PUSTAKA	
-----------------------------	--

LAMPIRAN	
-----------------	--

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan publik di berbagai Negara di belahan dunia. Berbagai pihak mengakui bahwa pembangunan pendidikan merupakan investasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga pendidikan menjadi sektor yang menyita perhatian Negara-negara di dunia. Perhatian yang cukup besar terhadap pendidikan dapat dilihat dari adanya prakarsa internasional yang pertama kali diluncurkan pada tahun 1990 untuk membawa manfaat pendidikan bagi setiap warga negara. Sejak tahun 1990, pemerintah di berbagai belahan dunia gencar mempromosikan “*Education For All*” yaitu Pendidikan Untuk Semua. Pada tahun 2000, para pemimpin global berkumpul dan berjanji untuk mencapai tujuan pendidikan pada tahun 2015 untuk memastikan bahwa setiap orang akan dapat menggunakan hak asasi manusia mereka untuk pendidikan - tidak peduli usia, jenis kelamin, etnis, pendapatan keluarga, di mana mereka hidup atau status cacat mereka.

Masalah terkait pendidikan di dunia yang dikemukakan sebelumnya menggambarkan bahwa sampai pada abad ini, masalah pendidikan menjadi tugas besar negara-negara di dunia. Kesenjangan pendidikan yang terjadi baik antar wilayah di suatu negara maupun negara yang satu dengan negara lainnya

dihadapkan pada realita bahwa tidak semua pemimpin negara di dunia menjadikan pendidikan ada di negaranya.

Masalah yang mengemuka dalam kebijakan pendidikan Indonesia baik dari awal kemerdekaan hingga sebelum masa reformasi, menuntut pemerintahan hingga masa reformasi untuk memerhatikan sektor pendidikan dan mewujudkannya melalui kebijakan pendidikan yang berpengaruh nyata terhadap penyelesaian masalah pendidikan. Indonesia pada dasarnya merupakan salah satu Negara yang memiliki perhatian lebih pada pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat dari tujuan Negara ini yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke IV. Diantara empat pokok pikiran yang mengatur hubungan Negara dengan warga tersebut, ada yang berkaitan dengan pendidikan yaitu menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bentuk pelaksanaan tujuan tersebut dapat dilihat dari pengalokasian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Indonesia (APBN) sebesar 20 % untuk sektor pendidikan.

Pendidikan merupakan hak dasar bagi manusia. Hal ini termaktub dalam Pasal 28 C, ayat (1), UUD 1945 yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Berdasarkan hal tersebut, maka pendidikan harus dapat diakses oleh setiap orang yaitu dengan tidak dibatasi oleh umur, tempat, dan waktu. Maka dari

itu, pemerintah memiliki keharusan menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik, mental, ekonomi, sosial, maupun geografis.

Masalah ekonomi menjadi faktor yang mengemuka di Indonesia yang menyebabkan tidak semua masyarakat mampu mengakses pendidikan maupun menjalani pendidikan hingga jenjang tertinggi seperti yang dikemukakan sebelumnya. Masalah ekonomi yang ada ditegaskan dengan adanya kesenjangan partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan menengah ke atas yang lebih terlihat nyata antar kuintil pengeluaran rumah tangga. Separuh dari penduduk pada kelompok kuintil pengeluaran teratas mampu mengenyam pendidikan hingga Perguruan Tinggi, lain halnya dengan kelompok kuintil pengeluaran terendah, hanya 8 persen penduduknya yang mampu mengenyam pendidikan hingga jenjang Perguruan Tinggi.

Pembangunan nasional di bidang pendidikan sudah dilakukan pemerintah melalui berbagai upaya baik dari segi perubahan kurikulum, program wajib belajar 9 tahun, pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah, adanya program Sertifikasi Guru dan terakhir pada era pemerintahan Joko Widodo membuat Program Indonesia Pintar. Tujuan pembangunan nasional khususnya di bidang pendidikan periode 2015-2019 secara jelas tertuang dalam Nawa Cita kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan Program Indonesia Pintar (PIP). Kemudian, secara internasional tujuan pembangunan di bidang pendidikan tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*)

khususnya pada tujuan keempat yaitu memastikan mutu pendidikan yang inklusif dan merata, serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.

Program Indonesia Pintar ini merupakan penyempurnaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program prioritas Presiden Joko Widodo yang dirancang khusus untuk membantu anak dari keluarga miskin/tidak mampu agar tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah/ sederajat dan telah di realisasikan di setiap sekolah- sekolah di Indonesia, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 mengamanatkan agar Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan kepada anak-anak yang berusia 6 sampai dengan 21 tahun dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), sebagai identitas untuk mendapatkan manfaat PIP. Bantuan pendidikan yang diberikan pemerintah kepada pemegang KIP di tingkat Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah/ Paket A sebesar Rp225.000,-/semester (Rp450.000,-/tahun), tingkat Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah/ Paket B sebesar Rp 375.000,-/semester (Rp750.000,-/tahun), dan tingkat Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah/ Paket C sebesar Rp500.000,-/semester (Rp1.000.000,-/tahun), serta Rp1.000.000,- untuk Peserta Kursus selama mengikuti kursus terstandar dalam satu periode kursus dalam satu tahun.

Perluasan cakupan pemberian Program Indonesia Pintar merupakan upaya pemerintah dalam mendorong keberlanjutan pendidikan anak dari keluarga miskin atau rentan miskin dengan cara memberikan bantuan untuk membiayai pendidikan personal peserta didik pada satuan pendidikan formal atau nonformal. Program

Indonesia Pintar merupakan kebijakan pendidikan yang dibuat pemerintah pusat di tengah otonomi daerah yang ada, sehingga penerimaan pemerintah daerah terhadap program yang dibuat pemerintah pusat dan melibatkan daerah merupakan hal yang menarik untuk dilihat. Apakah program pusat bagi pemerintah daerah adalah hal yang meringankan mereka atau justru menambah beban. Ketika kebijakan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar tidak menjadi focus bagi mereka, maka akan menjadi beban dalam mengimplementasikannya.

Permasalahan dalam mencapai tujuannya. Secara konseptual, Program Indonesia Pintar melalui KIP ini cukup jelas, termasuk sasaran penerimanya. Namun, pada tingkat implementasinya cukup problematik, baik menyangkut akurasi data yang digunakan sebagai dasar pemberian KIP maupun metode penyalurannya yang tidak tepat sasaran, permasalahannya tidak bisa terlepas dari permasalahan pemerintah pusat itu sendiri di karenakan korelasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang belum selaras, ini bisa dilihat dari total sk yang diterima oleh Kabupaten Bekasi.

Pada tahun 2022 Kabupaten Bekasi untuk Jenjang SMP menerima 25.377 sk yang dapat di cairkan akan tetapi Kabupaten Bekasi hanya mampu mencairkan 24.283 sk dimana 1.094 yang tidak dapat dicairkan oleh Kabupaten Bekasi, dalam pencairannya pun selalu ada kendala bagi sekolah yang ingin mencairkan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP), harus memastikan data virtualnya benar. Jika tidak, maka dana bantuan pendidikan dari pemerintah pusat tidak bisa cair. Kondisi ini

dialami sekolah-sekolah dasar. Kepala sekolah merasa terkejut ketika tidak bisa mencairkan dana KIP dari Bank BRI.

Alasannya hanya berdasarkan belum adanya data virtual dari kementerian pendidikan. Padahal sekolah-sekolah sudah menyerahkan data virtual kepada kementerian pendidikan untuk menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) tersebut, dan dalam penentuan data yang digunakan dalam penentuan calon siswa penerima PIP belum tepat sasaran sehingga menyebabkan angka putus sekolah di kabupaten bekasi pada tahun ajaran 2021 – 2022 masih tinggi yakni, 881 siswa. Tentu hal ini menjadikan bahan evaluasi bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dalam menjalankan Program Indonesia Pintar (PIP) agar tepat sasaran dan terserap 100% sk yang di berikan oleh Kementerian Pendidikan sehingga bisa memutus mata rantai angka putus sekolah di Kabupaten Bekasi semakin kecil.

Secara geografis letak Kabupaten Bekasi berada pada posisi 6° 10' 53" - 6° 30' 6" Lintang Selatan dan 106° 48' 28" -107° 27' 29" Bujur Timur. Topografinya terbagi atas dua bagian, yaitu dataran rendah yang meliputi sebagian wilayah bagian utara dan dataran bergelombang di wilayah bagian selatan. Ketinggian lokasi antara 6 – 115 meter dan kemiringan 0 – 250. Wilayah Kabupaten Bekasi terbagi ke dalam 23 kecamatan yang meliputi 7 kelurahan (Bahagia, Kebalen, Wanasari, Telaga Asih, Sertajaya, Jatimulya, Kertasari) dan 180 desa. Luas wilayah mencapai 127.388 Ha. Kecamatan yang paling luas yaitu kecamatan Muaragembong (14.009 Ha) atau 11 persen dari luas kabupaten.

Batas administrasi wilayah ini adalah Utara : Laut Jawa Selatan : Kabupaten Bogor Barat : Kota Jakarta Utara dan Kota Bekasi Timur : Kabupaten

Karawang Luas wilayah mencapai 127.388 Ha. Kecamatan yang paling luas yaitu kecamatan Muaragembong (14.009 Ha) atau 11 % dari luas kabupaten. Banyaknya desa di kecamatan berkisar antara 6, yaitu Kecamatan Cikarang Pusat, Bojongmangu, dan Muaragembong, sampai dengan 13, yaitu Kecamatan Pebayuran.

Kondisi Demografis Jumlah penduduk Kabupaten Bekasi tahun 2018 sebesar 3.63 juta jiwa tumbuh 11.86 persen pada periode 2015-2018. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) paling tinggi terjadi pada tahun 2015 dengan 3.95 persen. Meskipun jumlah penduduk terus meningkat, namun Pemerintah Kabupaten Bekasi berhasil menurunkan LPP. Pada aspek pendidikan, meningkatnya jumlah penduduk berimbas kepada kewajiban pemerintah untuk menyediakan pelayanan dasar kepada penduduk usia sekolah. Program pendidikan dasar sembilan tahun wajib diperoleh setiap warga negara. Pertambahan penduduk sama dengan pertambahan penyediaan dana pendidikan.

Jumlah penduduk paling banyak tinggal di Kecamatan Tambun Selatan dengan 519 ribu orang, Kecamatan Babelan 308 ribu orang dan Kecamatan Cibitung 295 ribu orang. Sedangkan tiga kecamatan dengan jumlah penduduk terendah 22 ditempati oleh: Kecamatan Bojongmangu 14.61 ribu orang, Kecamatan Kedung Waringin 6.37 ribu orang dan Kecamatan Karangbahagia 6.37 ribu orang. Sumber: Kabupaten Bekasi dalam Angka 2019 Gambar - 1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bekasi Tahun 2015-2018 B.

Kondisi Ketenagakerjaan Jumlah angkatan kerja Kab. Bekasi tahun 2018 sebanyak 1,630,423 orang, dari jumlah tersebut 1,472,432 orang sudah bekerja

dan 157,991 orang masuk kelompok pengangguran terbuka. Jumlah angkatan kerja didominasi oleh laki-laki 1,137,297 orang sedangkan perempuan sebanyak 493,126 orang. Dari 100 orang penduduk usia kerja laki-laki terdapat angkatan kerja sekitar 84 orang, sedangkan dari 100 orang penduduk usia kerja perempuan hanya ada sekitar 38 orang yang termasuk angkatan kerja.

Partisipasi perempuan masih jauh tertinggal sehingga TPAK Kab. Bekasi baru mencapai 61.46 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bekasi tahun 2018 sebesar 9.69 persen artinya dari 100 orang angkatan kerja 10 orang merupakan pengangguran terbuka. TPT terbanyak berjenis kelamin perempuan sebesar 11.67 persen sedangkan laki-laki 8.83 persen, artinya dari 100 orang angkatan kerja perempuan terdapat 11 orang pengangguran terbuka perempuan dan dari 100 orang angkatan kerja laki-laki 9 orang pengangguran terbuka laki-laki.

Pendidikan penduduk yang bekerja di Kabupaten Bekasi hampir seprauhnya berpendidikan SMA (49.00 persen) diikuti Diploma I/II/III/Akademi/Universitas 15.56 persen dan SD 13.50 persen. Hal ini menggambarkan bahwa pekerja di Kabupaten Bekasi memiliki pendidikan relatif rendah, masih didominasi oleh pendidikan dasar dan menengah Mayoritas penduduk Kabupaten Bekasi bekerja pada sektor industri pengolahan, dari total penduduk bekerja sebanyak 545,908 orang (37.08 persen) bekerja pada sektor industri pengolahan, diikuti sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dengan 310,709 orang (21.10 persen).

Hal ini relevan dengan pendidikan terakhir para pekerja yang berada pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kualitas pencari kerja masih relatif rendah, sebanyak 66.21 persen penganggur terbuka di Kabupaten Bekasi berpendidikan SMA, diikuti oleh berpendidikan SMP sebanyak 17.08 persen dan SD sebesar 7.87 persen.

1.2 Permasalahan

Adapun masalah terkait Program Indonesia Pintar Tahun 2022 yang masih terjadi yaitu masih banyak warga miskin yang belum terdaftar sebagai penerima PIP, pendistribusian dan pencairan dana PIP yang bermasalah, belum tepatnya penggunaan dana PIP. Berbagai masalah tersebut ditemui di berbagai wilayah Kabupaten Bekasi.

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka didapat masalah-masalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP) Jenjang SMP di Kabupaten Bekasi masih belum merata.
2. Penyerapan Dana Program Indonesia Pintar (PIP) Jenjang SMP di Kabupaten Bekasi belum maksimal.
3. Proses Aktivasi Tabungan PIP siswa SMP masih banyak kendala.
4. Proses pencairan dana PIP Jenjang SMP masih ada masalah.
5. Pengajuan calon penerima PIP baru Jenjang SMP melalui jalur Non DTKS maupun Dapodik masih belum maksimal.

6. Pengisian data siswa layak PIP Jenjang SMP di Dapodik belum sesuai ketentuan.
7. Pemegang KIP Jenjang SMP belum dapat menerima dana PIP semuanya.
8. Peran Bank penyalur dalam melaksanakan tugasnya belum sesuai.
9. Belum maksimalnya Peran Dinas Pendidikan Kabupaten dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) Jenjang SMP di Kabupaten Bekasi.
10. Juknis dan ketentuan Pelaksanaan Pelayanan Program Indonesia Pintar (PIP) selalu berubah setiap tahunnya (Persesjen) dari pusat sesuai dengan kondisi dan situasi.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, maka masalah yang akan diteliti hanya dibatasi pada Peran Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) Jenjang SMP di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Persesjen Nomor 14 Tahun 2022 tentang “ Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah”.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti sesuai dengan peran Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota berdasarkan Persesjen Nomor 14 tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengusulan Peserta Didik calon penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Jenjang SMP di Kabupaten Bekasi ?

2. Bagaimana Proses Sosialisasi dan Koordinasi pelaksanaan PIP SMP di Kabupaten Bekasi ?
3. Bagaimana pelayanan pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Bekasi ?
4. Bagaimana Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PIP di Kabupaten Bekasi ?
5. Seperti apakah Tugas dan Wewenang lainnya dalam pelaksanaan PIP di Kabupaten Bekasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Hasil penelitian berupa bahan Evaluasi untuk peningkatan Pelayanan Publik khususnya dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar oleh Dinas Pendidikan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 yang sesuai dan bisa menjadi Problem Solving (Pemecah Permasalahan), sehingga kepercayaan masyarakat akan Aparatur Pemerintahan Daerah bisa menciptakan Good Government (Pemerintahan Yang Baik) bisa terwujud.

Setiap penelitian yang diajukan mempunyai sasaran ataupun tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Peran Dinas Pendidikan Kabuapten Bekasi dalam Penyelenggaraan Program Indonesia Pintar Khususnya untuk Jenjang SMP sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan dan menambah khazanah keilmuan dalam bidang Ilmu Pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.

2. Secara akademik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan secara akademik dan menjadi referensi tambahan dalam kajian keilmuan khususnya dalam bidang Ilmu Pemerintahan.
3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan beberapa masukan dan saran bagi instansi terkait maupun masyarakat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Teori Peran

Peran menurut ahli sosiologi, seperti Ralph Linton yaitu “the dynamic aspect of status” seseorang menjalankan peranan manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan status, sedangkan suatu status adalah “collection of right and duties” suatu kumpulan hak dan kewajiban. Peran merupakan fungsi yang terwujud jika seseorang yang berada di dalam suatu kelompok sosial tertentu. Peran merupakan suatu perilaku yang memiliki suatu status dan bisa terjadi dengan atau tanpa adanya batasan-batasan job description bagi para pelakunya.

Saat seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan mencakup tiga hal, yaitu: a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. b. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang

dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. c. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat.

Pengertian Peran menurut para ahli adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Menurut Kozier Barbara peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa.

Peran akan menjadi bermakna ketika peran itu dikaitkan dan digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain, komunitas sosial yang terjadi di masyarakat. Peran juga bisa dikatakan sebagai kombinasi dari posisi keberadaan seseorang di mata masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat. Jika seseorang melaksanakan kewajiban dan haknya sebagai seorang warga negara yang baik, berarti telah menjalankan suatu peran, yakni peran sebagai warga negara.

Peran selalu berdampingan dengan status dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Dalam istilah saling membutuhkan, jika tidak ada peran dalam masyarakat tandanya juga orang tersebut tidak ada status kedudukan atau status, begitu pula sebaliknya. Karena manusia adalah makhluk sosial, setiap orang mempunyai beraneka peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat.

Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya, contohnya adalah peran pendakwah pasti diberi wewenang oleh masyarakat untuk memberi ilmu agama di masjid-masjid atau di majlis taklim di lingkungan masyarakatnya, sehingga peran menjadi seorang pendakwah berfungsi dan diakui di masyarakat sekitar. Namun perlu diingat, bahwa peran juga diatur oleh norma dan aturan masyarakat yang berlaku.

Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri terhadap masyarakat, dan peran diartikan sebagai sebuah proses. Peran juga sangat penting bagi seseorang di masyarakat. Guna untuk pertahanan hidup supaya seseorang diakui dan mempunyai harga diri. Adapun pengertian peran mencakup tiga hal antara lain : Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat. Jadi, peran di sini bisa berarti peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat.

Sedangkan menurut Merton (dalam Raho 2007 : 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian peran juga diartikan sebagai kelengkapan dari hubungan antar manusia berdasarkan peran yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukan di masyarakat.

Selanjutnya Menurut Dougherty & Pritchard tahun 1985 (dalam Bauer 2003: 55) teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan”. Menurut Abu

Ahmadi (1982) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh, (Soerjono Soekanto 1987: 220).

Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya dinas perhubungan sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu

jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan.

Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
3. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya.

Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (role). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang

melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran, (Miftah Thoha, 1997).

Sedangkan menurut Merton (dalam Raho 2007 : 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus.

Selanjutnya Menurut Dougherty & Pritchard tahun 1985 (dalam Bauer 2003: 55) teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan” (h. 143).

Lebih lanjut, Dougherty & Pritchard tahun 1985 (dalam Bauer 2003: 56) mengemukakan bahwa relevansi suatu peran itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat (biasanya supervisor dan kepala sekolah) terhadap produk atau outcome yang dihasilkan. Dalam hal ini, strategi dan struktur organisasi juga terbukti mempengaruhi peran dan persepsi peran atau role perception (Kahn, et al., 1964; Oswald, Mossholder, & Harris, 1997 dalam Bauer, 2003: 58).

Levinson (dalam Soekanto 2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. - Peran serta dapat pula dikenali dari keterlibatan, bentuk kontribusi, organisasi kerja, penetapan tujuan, dan peran.

Parwoto (dalam Soehendy,1997:28). Beliau mengemukakan bahwa peran serta mempunyai ciri-ciri :

1. Keterlibatan dalam keputusan : mengambil dan menjalankan keputusan.
2. Bentuk kontribusi : seperti gagasan, tenaga, materi dan lain-lain.
3. Organisasi kerja : bersama setara (berbagi peran).
4. Penetapan tujuan : ditetapkan kelompok bersama pihak lain.
5. Peran masyarakat : sebagai subyek.

Struktur Peran dibagi menjadi dua yaitu :

1. Peran Formal (Peran yang Nampak jelas) Yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar terdapat dalam keluarga.

2. Peran Informal (Peran tertutup) Yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk

memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah peran-peran formal.

Pada akhir tahun 1960-an, Henry Mintzberg, seorang lulusan MIT, melakukan penelitian seksama terhadap lima orang eksekutif untuk menentukan tugas mereka. Berdasarkan observasinya, Mintzberg menyimpulkan bahwa manajer melakukan sepuluh peran atau rangkaian perilaku yang berbeda dan saling berkaitan erat. Seperti yang diperlihatkan dalam table di bawah ini, kesepuluh peran ini bisa dikelompokkan sebagai antarpersonal, interpersonal, dan pengambilan keputusan.

a. Peran Antar personal Semua manajer diharuskan melakukan tugas-tugas terkait seremonial dan bersifat simbolis. Sebagai contoh, ketika rector perguruan tinggi memberikan ijazah sarjana pada acara wisuda atau seorang pengawas pabrik menjadi pemandu tur pabrik untuk sekelompok murid sekolah menengah, ia berperan sebagai tokoh utama (figurehead). Semua manajer memiliki peran kepemimpinan. Peran ini mencakup perekrutan, pelatihan, pemberian motivasi, dan pendisiplinan karyawan. Peran ketiga dalam pengelompokan antarpersonal adalah peran penghubung.

Mintzberg mendeskripsikan aktivitas ini sebagai hubungan dengan individu luar yang memberikan informasi kepada manajer tersebut. Individu luar tersebut mungkin adalah individu atau kelompok di dalam atau di luar organisasi. Manajer penjualan yang mendapatkan informasi dari manajer pengendalian kualitas di perusahaannya sendiri mempunyai kerja sama hubungan internal. Ketika

manajer penjualan tersebut berhubungan dengan eksekutif penjualan lain melalui sebuah asosiasi perdagangan pemasaran, ia mempunyai suatu kerja sama hubungan eksternal.

b. Peran Informasional Semua manajer, sampai pada tingkat tertentu, mengumpulkan informasi dari organisasi-organisasi dan institusi luar. Biasanya, mereka mendapatkan informasi dengan membaca majalah dan berkomunikasi dengan individu lain untuk mempelajari perubahan selera masyarakat, apa yang mungkin direncanakan oleh para pesaing, dan sebagainya. Mintzberg menyebut hal ini sebagai peran pemantau. Para manajer juga bertindak sebagai penyalur untuk meneruskan informasi ini kepada anggota organisasional. Hal ini disebut sebagai peran penyebar. Selain itu, manajer bertindak selaku juru bicara ketika mereka mewakili organisasi di hadapan pihak luar.

c. Peran Pengambilan Keputusan Akhirnya, Mintzberg mengidentifikasi empat peran terkait pengambilan keputusan. Dalam peran kewirausahaan, para manajer memulai dan mengawasi proyek-proyek baru yang akan meningkatkan kerja organisasi mereka. Sebagai penyelesaian masalah, manajer melakukan tindakan korektif untuk menyelesaikan berbagai masalah yang tidak terduga. Sebagai pengalokasi sumber daya, manajer bertanggung jawab menyediakan sumber daya manusia, fisik, dan moneter. Terakhir, manajer memainkan peran negosiator, dimana mereka mendiskusikan berbagai persoalan dan tawar-menawar dengan unit-unit lain demi keuntungan unit mereka sendiri.

Teori peran (role theory) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikolog, teori

peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga bidang ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bercermin sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu (Sarwono, 2013:215).

Teori peran adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam kategori sosial (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya.

Teater adalah metafora sering digunakan menggambarkan teori peran. (Sumber: <https://rinawahyu42.wordpress.com/2011/06/07/teori-peran-role-theory/> diakses pada 23 Januari 2018 pukul 15:03 WIB). Menurut Robert Linton (1936), teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama kita untuk menuntun berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. (Sumber:

<https://fahir-blues.blogspot.co.id/2013/06/teori-peran-dan-definisi-peran-menurut.html?m=1> diakses pada 23 Januari 2018 pukul 15:43WIB).

Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2013:215), membagi peristilahan teori peran dalam empat golongan yaitu menyangkut:

1. orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
2. perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
3. kedudukan orang-orang dalam berperilaku;
4. kaitan antar orang dan perilaku.

Soekanto (2007: 213), mengungkapkan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2013:224), menyatakan bahwa peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Hal ini senada dengan Suhardono (1994:15), mendefinisikan bahwa peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang, yang menduduki suatu posisi.

Suhardono dalam Patoni (2007:40), mengungkapkan bahwa peran dapat dijelaskan dengan beberapa cara yaitu: pertama, penjelasan historis: konsep peran pada awalnya dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama dan teater yang hidup subur pada zaman Yunani Kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Kedua, pengertian peran menurut

ilmu sosial, peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.

Peran yang dikemukakan oleh Arimbi, Horoepoetri, dan Santosa (2003) yang memiliki 5 dimensi yaitu peran sebagai kebijakan, peran sebagai strategi, peran sebagai alat komunikasi, peran sebagai penyelesaian sengketa, dan peran sebagai terapi.

Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak

orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan Pemerintahan/Lembaga yang penulis teliti yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu melainkan merupakan tugas dan wewenang Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi itu sendiri.

2.1.2 Teori Pemerintahan

Pemerintahan dalam bahasa Inggris disebut government yang berasal dari bahasa Latin; *gubernare*, greek *kybernan* yang berarti mengemudikan, atau mengendalikan. Tujuan pemerintah meliputi external security, internal order,

justice, general welfare dan fredom. Tidak berbeda jauh dengan pendapat S.E. Finer yang melihat pemerintah mempunyai kegiatan terus-menerus (process), wilayah negara tempat kegiatan itu berlangsung (state), pejabat yang memerintah (the duty), dan cara atau metode serta sistem (manner, method, and system) dari pemerintah terhadap masyarakatnya.

Pendapat tersebut berbeda dengan R. Mac Iver, yang memandang pemerintah dari sudut disiplin ilmu politik, “*government is the organization of men under authority... how men can be governed*”. Maksudnya, pemerintahan itu adalah sebagai organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan...bagaimana manusia itu bisa diperintah. Jadi ilmu pemerintahan bagi R. Mac Iver adalah sebuah ilmu tentang bagaimana manusia-manusia dapat diperintah (*a science of how men are governed*)”.

Kebutuhan akan pemerintahan berangkat dari fakta bahwa manusia butuh hidup dalam komunitas, juga otonomi pribadi harus dipertahankan dalam komunitas-komunitas ini. Sebuah negara yang memiliki luas dan kompleksitas yang sangat besar biasanya akan memiliki tingkatan pemerintahan: lokal, regional, dan nasional. Sehubungan dengan pengertian pemerintah sangat tergantung pada masing-masing sistem pemerintahan, antara lain:

1. Monarki (Monarchy) Monarki adalah pemerintahan yang dipimpin oleh seseorang yang telah diwariskan secara turun temurun. Monarki, berasal dari bahasa Yunani yaitu monos yang berarti satu, dan archein yang berarti pemerintah.

Monarki merupakan sejenis pemerintahan di mana raja menjadi kepala negara. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia. Pada awal kurun abad ke-19, terdapat lebih 900 buah tahta kerajaan di dunia, tetapi menurun menjadi 240 buah dalam abad ke-20. Sedangkan pada dekade kedelapan abad ke-20, hanya 40 tahta saja yang masih ada.

2. Despotisme (Despotism) Despotisme adalah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pemimpin saja dan semua rakyatnya dianggap sebagai hamba.

3. Kediktatoran (Dictatorship) Kediktatoran adalah pemerintahan yang dipimpin oleh seseorang yang memiliki kekuasaan penuh atas rakyat dan negaranya.

4. Oligarki (Oligarchy) Oligarki adalah pemerintahan yang dipimpin oleh sekelompok kecil orang yang memiliki kepentingan bersama atau memiliki hubungan kekeluargaan.

5. Plutokrasi (Plutocracy) Plutokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari kelas tertinggi atau kelompok kaya.

6. Demokrasi (Democracy) Demokrasi adalah pemerintahan yang rakyatnya memegang kekuasaan. Demokrasi dapat bersifat langsung (direct democracy) maupun melalui perwakilan (representative democracy). Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif,

yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar antara satu dengan lainnya.

Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

7. Teokrasi (Theocracy) Teokrasi adalah pemerintahan yang dipimpin oleh para elit keagamaan.

Pemerintahan menurut S.E. Finer (Finer, 1974 dalam Sumaryadi, 2010: 18) mengklasifikasikan pemerintah ke dalam 4 (empat) pengertian, yakni:

1. Pemerintah mengacu pada proses pemerintahan, yakni pelaksanaan kekuasaan oleh yang berwenang.
2. Istilah ini juga bisa dipakai untuk menyebut keberadaan proses itu sendiri kepada kondisi adanya tata aturan.
3. Pemerintah sering berarti orang-orang yang mengisi kedudukan otoritas dalam masyarakat atau lembaga, artinya kantor atau jabatan-jabatan dalam pemerintahan.
4. Istilah ini juga bisa mengacu pada bentuk, metode, sistem pemerintah dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan dinas pemerintah dan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah.

Selain kata pemerintahan, ada juga kata pemerintahan, yang menurut Ndraha diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut keadaan pemerintah (Ndraha, 2005: 141). Lebih lanjut dikatakan bahwa kata government dapat

diartikan sebagai pemerintah (*the governing body of persons in a state*) dan bisa juga diartikan pemerintahan (*the political direction and control exercised over the action of the members, citizens or inhabitants of communities, societies, and state*). Kata governance menurut leksikografi diartikan juga sebagai government, exercise of authority, control; method or system of government.

Baik government maupun governance berasal dari kata govern (memerintah, dari Latin; gubernare, gerik; kybernan, to steer, mengemudi kapal, dan sebagainya). Governing terjadi dan terdapat di mana-mana dan kapan saja pada setiap bentuk kehidupan sosial, termasuk kehidupan sosial khusus yang oleh Aristoteles dikategorikan sebagai “polity”. Governing (dalam) “polity” disebut “openbaar bestuur” (Soewargono, 1993 dalam Sumaryadi, 2010:19).

Masih menurut sumber yang sama, hubungan antara government dengan governance diungkapkan oleh Leo Fonseka dalam *Good governance..... while the term government indicates a political unit for the function of policy making as distinguished from the administration of policies, the word governance denotes an overall responsibility for both the political and the administrative functions. It also implies ensuring moral behavior and ethical conduct in the task of governing i.e. the continuous ethical exercise of authority on both the political and administrative units of governments*. Kata governance (policy making, regeren, mengatur dan administration, besturen, mengurus) lebih luas daripada government (policy making saja).

Menurut Leo Fonseka, *there are three main regimes involved in good governance. They are the State, the Civil Society, and the Private Sector*. Dalam

The International Encyclopedia of Social Science (1974), pemerintah diartikan sebagai sekelompok orang yang bertanggung jawab atas penggunaan kekuasaan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintah diartikan sebagai sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan, atau sistem menjalankan perintah, yang memerintah. Di Belanda, pemerintah disebut juga *administratie* untuk pemerintah dalam arti luas, *bestuur* dalam arti sempit. Dalam konteks lain disebut juga *overheid*, yang di Indonesia disebut penguasa.

Menurut I Nyoman Sumaryadi; pemerintahan yaitu pelayanan public, service and civil service yang bersifat bukan monodisipliner, melainkan multidisipliner bahkan mengarah pada transdisipliner (Sumaryadi, 2013; Sedangkan menurut Ermaya Suradinata mengemukakan bahwa etika pemerintahan adalah kegiatan dan sikap perilaku yang dilakukan oleh manusia baik sebagai aparatur pemerintahan maupun sebagai pribadi dalam kegiatan pemerintahan sesuai aturan tertulis maupun tidak tertulis berdasarkan ajaran moral untuk mencapai tujuan tertentu.

Filosof J.J. Rousseau, pencetus teori *The Social Contract*, mengartikan pemerintah sebagai suatu badan penengah yang didirikan antara rakyat sebagai subjek dan penguasa, untuk saling menyesuaikan, ditugaskan melaksanakan hukum dan memelihara dengan baik kemerdekaan sipil dan politik. Sementara, Max Weber (dalam Dahl, 1994) mengartikan pemerintah sebagai apa pun yang berhasil menopang klaim bahwa dialah yang secara eksklusif berhak menggunakan kekuatan fisik untuk memaksakan aturan-aturannya dalam suatu batas wilayah tertentu.

Soewargono, mengartikan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan politik, sering disebut pula penguasa sebagai penyelenggara pemerintahan umum (Soewargono, 1979 dalam Sumaryadi, 2010: 20). Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa pemerintah (government) secara etimologis berasal dari kata Yunani; kubernan atau nakhoda kapal, artinya menatap ke depan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat-negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat-negara pada masa yang akan datang dan mempersiapkan langkah-langkah untuk menyongsong perkembangan masyarakat serta mengelola dan mengarahkan masyarakat ke tujuan yang ditetapkan.

Oleh karena itu, kegiatan pemerintah lebih menyangkut pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik dalam rangka mencapai tujuan masyarakat negara (Surbakti, 1992: 167). Ndraha (2003) mengartikan pemerintah sebagai badan yang memproses pemenuhan kebutuhan manusia sebagai konsumen produk-produk pemerintahan akan pelayanan publik dan sipil. Pemerintah (government) lahir dari delegasi kekuasaan oleh rakyat. Sedangkan pemerintah (governance) menunjuk pada kemampuan dan spontanitas dari kelompok-kelompok sosial dalam mengatur dirinya sendiri, menunjuk pula pada metode, manajemen, organisasi. Governance lebih sebagai gejala sosial, dan lebih luas dari government. Government memerlukan proses politik. Governance menunjukkan adanya tatanan dan kemampuan sedangkan government menunjuk pada organ.

Konsep government menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah). Konsep governance

tidak sekedar melibatkan pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor di luar pemerintah dan negara sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas.

Menurut W.S. Sayre (19), Government is best as the organized agency of the state, expressing and exercising its authority. Maksudnya pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Menurut C.F. Strong (1960: 6), *Government in the broader sense is changed with the maintenance of the peace and security of state with in and with out. It must therefore, have first military power or the control of armed forces, secondly legislative power or the means making laws, thirdly financial power or the ability to extract sufficient money from the community to defray the cost of defending of state and of enforcing the law it makes on the state's behalf.*

Maksudnya pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, oleh karena itu pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam penyelenggaraan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.

Menurut Robert Mac Iver (1960: 5), *Government is the organization of men under authority... how man can be govern.* Maksudnya pemerintah adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai

kekuasaan... bagaimana manusia itu bisa diperintah. Menurut Woodrow Wilson (1924: 9), *Government in last analysis, is organized force, not necessarily or invariably organized armed force, but two of a few man, of many man, or of a community prepared by organization to realized its own purpose with references to the common affairs or the community.*

Maksudnya pemerintah dalam akhir uraiannya, adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan.

Menurut David Apter (1977: 10), *Government is most generalized membership unit prossessing (a) defined responsibilities for maintenance of the system of which it is a part and (b) a practical monopoly of coercive power.* Maksudnya pemerintahan itu adalah merupakan satuan anggota yang paling umum yang memiliki (a) tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya itu adalah bagian dan (b) monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan. Menurut Samuel Edward Finer (1974: 34), Pemerintah harus mempunyai kegiatan terus-menerus (process), negara tempat kegiatan itu berlangsung (state), pejabat yang memerintah (the duty) dan cara, metode serta sistem (manner, method and system) dari pemerintah terhadap masyarakat. Menurut Soemendar (1985: 1), Pemerintahan sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah mesti memperhatikan pula ketenteraman dan

ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo (1984: 19), tugas pemerintah antara lain adalah tata usaha negara, rumah tangga negara, pemerintahan, pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup. Sedangkan fungsi pemerintah adalah pengaturan, pembinaan masyarakat, kepolisian dan peradilan.

Dari beberapa pengertian di atas, konsep tentang pemerintah berkaitan dengan:

1. Badan-badan publik yang bertanggung jawab dalam sebagian atau seluruh rute penyediaan jasa atau layanan melalui otorisasi atau privatisasi;
2. Pemerintah dalam arti luas yang meliputi konsep trias politica (eksekutif, legislatif dan yudikatif);
3. Tingkatan pemerintah yang mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

Tujuan fundamental dari pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan (basic security) dan keteraturan umum (public order) agar individu-individu dapat menemukan Studi Pemerintahan Daerah dan kebahagiaan. Filosof Thomas Hobbes menunjukkan bahwa manusia sebagai binatang rasional (rational animals) menunjukkan kepatuhannya kepada pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa. Masyarakat dalam satu komunitas menciptakan dan taat pada pemerintahan untuk tujuan membangun bagi diri mereka keamanan dan ketertiban umum (safety and public order).

Peranan pemerintahan dalam kehidupan masyarakat telah mendunia secara signifikan selama sejarah umat manusia. Peran pemerintah penting dalam menciptakan keamanan dasar (basic security) hingga perhatian dalam urusan keagamaan dan kepercayaan serta mengontrol ekonomi nasional dan secara kekinian menjamin keamanan kehidupan sosial.

Sebagaimana masyarakat kita menjadi lebih kompleks, pemerintah juga menjadi lebih kompleks, lebih berkuasa, dan lebih mendominasi. Kontroversi mengenai betapa besar, berkuasa, dan betapa dominasinya pemerintah akan terus berlanjut dalam sisa sejarah hidup manusia. Berkaitan dengan tujuan pemerintahan, dalam konteks kybernology, Ndraha berpendapat bahwa pemerintahan bertujuan melindungi hak-hak eksistensi (asasi) manusia, melestarikan lingkungannya, dan memenuhi kebutuhan dasarnya melalui proses interaksi 3 (tiga) peran, yaitu:

1. Meningkatkan nilai sumber daya yang ada dan menciptakan (membentuk) sumber daya baru sebagai peran SubKultur Ekonomi (SKE);
2. Mengontrol SKE, memberdayakan, dan mendistribusikan nilai-nilai yang telah berhasil ditingkatkan atau dibentuk oleh SKE, melalui pelayanan kepada pelanggan oleh Sub Kultur Kekuasaan (SKK);
3. Mengontrol SKK oleh peran Sub Kultur Pelanggan (SKP). Jika tujuan tersebut tercapai, pemerintahan (governance) berkualifikasi baik (sehat, good) (Ndraha, 2008: 6-7).

Dengan rakyatnya berkenaan dalam berbagai persoalan pelaksanaan kebijakan yang kurang bisa diterima oleh “kepentingan dan rasa keadilan

masyarakat”. Misalnya cara penanganan “sengketa lahan tanah garapan”, “eksekusi pengadilan tentang pertanahan”, “penanganan pedagang kaki lima (PKL)”, beberapa kebijakan pemerintah yang cenderung berpihak bukan terhadap kepentingan publik, dan lain-lain.

Dengan demikian pada kesempatan ini akan membahas beberapa konsep dan teori mengenai “fungsi pemerintahan”, dimaksudkan sebagai upaya memberikan bahan kajian dan juga diskursus yang bersumber dari para pakar, yang diharapkan mendapat apresiasi para pemerhati dan praktisi dalam rangka membangun dan mengembangkan percepatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan guna menjamin dan menyediakan “pelayanan publik” yang memuaskan seluruh elemen masyarakat (Istianto, 2011: 21-22). Pemerintah merupakan suatu bentuk organisasi dasar dalam suatu negara.

2.1.3 Kapasitas Organisasi

Beberapa ahli mengemukakan pandangan teoritis terkait kapasitas. Kaplan (2007) mengemukakan bahwa *Capacity is the ability of an organisation to function as a resilient, strategic and autonomous entity* yang artinya kapasitas adalah kemampuan organisasi untuk berfungsi sebagai entitas yang ulet, strategis dan otonom. Definisi berbeda yaitu UNDP (2007:5)menjabarkan bahwa *Capacity is the ability of individuals, institutions and societies to perform functions, solve problems and set and achieve objectives in a sustainable manner* (kapasitas adalah kemampuan individu, lembaga dan masyarakat untuk melakukan fungsi, memecahkan masalah dan menetapkan dan mencapai tujuan secara berkelanjutan). Keduanya memiliki makna yang berbeda, Kaplan lebih berfokus

kapasitas pada organisasi sedangkan UNDP memandang kapasitas pada individu, lembaga dan masyarakat. Namun keduanya memiliki pandangan yang sama bahwa kapasitas berkaitan dengan kemampuan.

Secara sederhana, kapasitas organisasi dimaknai sebagai kemampuan untuk melakukan aktivitas-aktivitas organisasi yang dikemukakan Yu-Lee (dalam Irawan, 2016:16-17). Sementara bila dispesifikkan pada sektor publik, kapasitas organisasi didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah untuk menyusun, mengembangkan, memimpin dan mengendalikan, manusia, sumber daya keuangan, fisik dan informasi dan di sektor sosial atau nirlaba, kapasitas organisasi merupakan seperangkat praktek manajemen, proses atau atribut yang membantu organisasi untuk memenuhi misinya.

Kapasitas organisasi juga dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk berhasil menerapkan keterampilan dan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi dan sekaligus memenuhi harapan pemangku kepentingan. Dari beberapa pandangan terkait kapasitas, maka dapat disimpulkan bahwa organisasi apapun itu baik nirlaba maupun pemerintah, kapasitas dapat dimaknai sebagai kemampuan dari organisasi itu sendiri untuk mengarahkan, mengakomodir segala sumber daya yang ada untuk mewujudkan tujuan yang ada dan harapan dari pemangku kepentingan akan organisasi dapat terpenuhi.

Beberapa ahli melihat kapasitas terutama sebagai masalah sumber daya manusia, untuk dilakukan pengembangan keterampilan dan pelatihan di tingkat individu. Namun seiring berjalannya waktu, ruang lingkup masalah kapasitas

diluar dari pendekatan pelatihan, dimana kapasitas adalah salah satu kemampuan untuk memberikan atau mengimplementasikan yang lebih baik.

Dalam melihat kapasitas organisasi, Irawan (2016:18-19) menghubungkan faktor-faktor yang menjadi acuan dalam pengukuran kapasitas organisasi yang secara konsep dapat dikelompokkan ke dalam tiga level aktivitas organisasi yakni level teknis, level manajerial dan level institusi. Tabel berikut akan menjelaskan secara singkat terkait analisa tersebut.

Tabel 2.1 Klasifikasi Kapasitas Organisasi berdasarkan Level Aktivitas

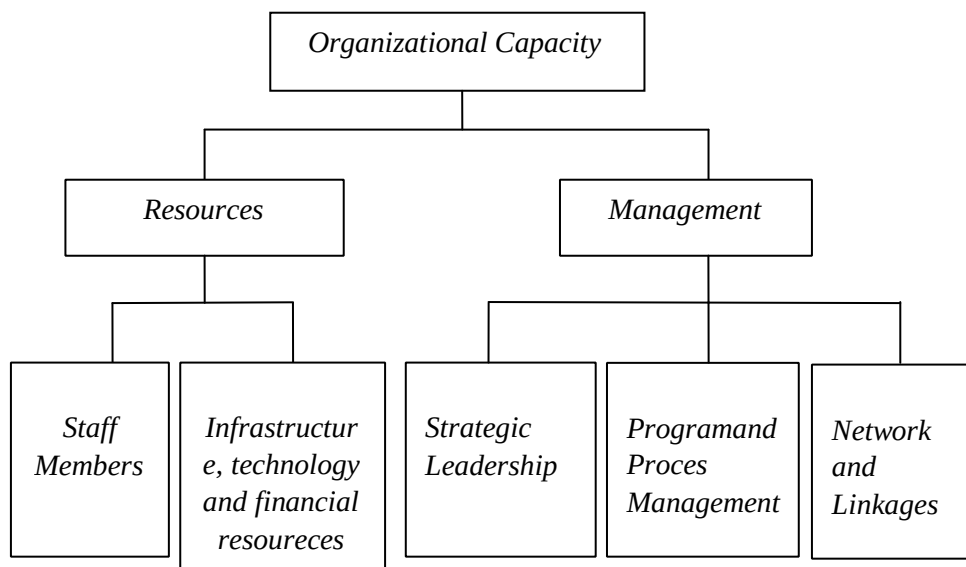
Level	Eisinger (2002)	Horton et al. (2003)	Christensen &
Teknis	Sumber Daya Keterampilan	Staff, infrastruktur, teknologi, pembiayaan	Sumber Daya Manusia, Infrastruktur,
Manajerial	Kepemimpinan Yang Efektif	Kepemimpinan strategis, program, proses manajemen	Sistem Manajemen
Institusional	Kelembagaan dan hubungan eksternal	Jejaring dan keterkaitan	Karakteristik Politik

Sumber: Irawan (2016:19)

Salah satu dari pendapat ahli di atas dapat dijabarkan lebih dalam lagi yaitu Horton et al. (2003:20), menjabarkan *Evaluating Capacity Development* untuk melihat kapasitas organisasi dapat dilakukan dengan menganalisis dua elemen utama yaitu sumber daya dan manajemen. Selanjutnya pada masing-masing komponen dipecah menjadi bagian tertentu sebagai komponen pendukung.

Komponen pertama yakni sumber daya, terdiri dari sumber daya manusia (pegawai) dan sumber daya bukan manusia yang dapat berupa infrastruktur, teknologi dan keuangan sedangkan pada komponen manajemen terdiri dari tiga bagian yakni kepemimpinan, program dan proses, serta jaringan kerjasama.

Gambar 2.1 Kapasitas Organisasi



Sumber :Horton et al.(2003:24)

Dari bagan diatas dapat diketahui bahwa untuk melihat kapasitas organisasi dapat dilihat dari sumber daya dan manajemen. Kategori sumber daya (*resources*) dapat diketahui dari bagaimana anggota staff, insfrastruktur, teknologi dan sumber daya keuangan sedangkan kategori manajemen (*management*) dapat diketahui dari bagaimana kepemimpinan strategis, program dan proses manajemen, serta jaringan dan hubungan.

Tabel 2.2 Aspek Kapasitas dalam Kapasitas Operasionalnya

No	Aspek Kapasitas	Kapasitas Operasionalnya
----	-----------------	--------------------------

1	Sumber Daya	a. Proses Rekrutmen b. Ketersediaan SDM c. Pelatihan
2	Infrastruktur Keuangan Teknologi	a. Fasilitas yang tersedia b. Sumber Keuangan c. Penggunaan teknologi
3	Manajemen	a. arah organisasi b. motivasi c. pengambilan keputusan
4	Program dan Manajemen	a. perencanaan dan perumusan b. pemantauan dan evaluasi c. pelaporan
5	Jaringan Kerjasama	a. membangun kemitraan b. <i>Outsourcing</i>

Sumber : Horton *etal.*(2003:28-29)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa berbagai aspek kapasitas memiliki kapasitas operasional yang berbeda satu sama lain yang dapat digunakan dalam menilai kapasitas suatu organisasi. Adapun untuk menilai kapasitas organisasi yang lebih dispesifikkan pada sektor publik dapat diketahui dari apa yang dikemukakan Polidano(1999:21). Terdapat tiga indikator penting untuk menjelaskan kapasitas sektor publik, sebagai berikut :

- 1) *Policy capacity*(Kapasitas Kebijakan), yaitu kemampuan untuk membangun proses pengambilan keputusan, mengkoordinasikan antar lembaga pemerintah dan memberikan analisis terhadap keputusan tadi.

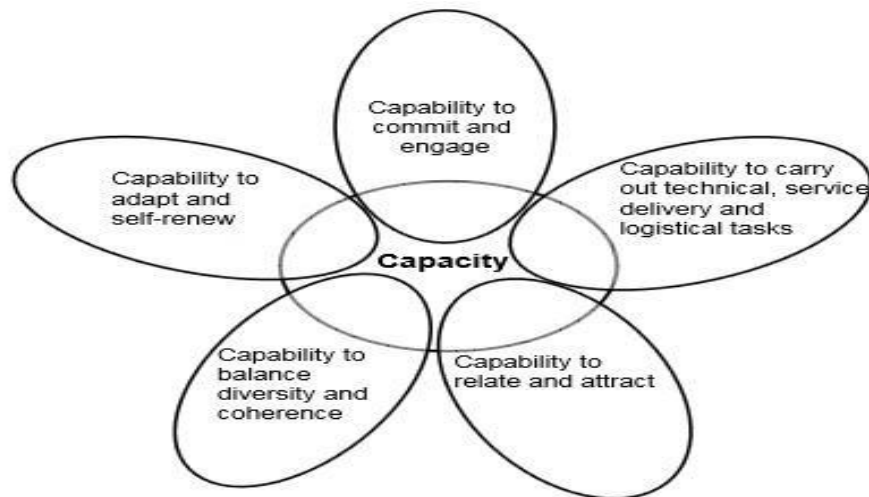
- 2) *Implementation authority* (WewenangPelaksana), yaitu kemampuan untuk menjalankan dan menegakkan kebijakan baik terhadap dirinya sendiri maupun masyarakat secara luas dan kemampuan untuk menjamin bahwa pelayanan umum benar-benar diterima secara baik oleh masyarakat.
- 3) *Operational efficiency* (Efisiensi Operasional), yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan umum secara efektif/efisien, serta dengan tingkat kualitas yang memadai.

Dari pandangan yang dikemukakan Polidano, kapasitas tidak hanya sebatas aspek manajemen dan sumberdaya saja, tetapi aspek kapasitas kebijakan juga dilihat dalam menelaah kapasitas dari suatu organisasi. Pandangan mengenai kapasitas organisasi yang berbeda dengan ahli lainnya dikemukakan oleh Baser et al. dimana kapasitas organisasi juga dibangun oleh pola pikir, motivasi dan harapan individu dalam organisasi.

Menurut Baser et al. (2008:26-33), kapasitas adalah kekuatan dan identitas, properti yang memungkinkan suatu organisasi atau kelompok sadar akan dirinya sendiri, untuk tumbuh, mendiversifikasi, bertahan hidup dan menjadi lebih kompleks. Ide inti yang mendasari konsep kapasitas adalah kemampuan suatu sistem, besar atau kecil, untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu dan pada waktu tertentu. Pola pikir, motivasi dan harapan individu tetap memberikan kontribusi penting untuk kapasitas, tidak peduli betapa rumitnya sistem.

Adapun 5 elemen kapasitas organisasi menurut Baser et al. sebagai berikut:

Gambar 2.2. Elemen Kapasitas



Sumber : Baser et al. (2008:26)

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa terdapat elemen yang saling terikat yang semuanya membentuk kapasitas organisasi yaitu kemampuan untuk berkomitmen dan terlibat, kemampuan melaksanakan tugas-tugas teknis, kemampuan dalam penyampaian layanan dan logistik, kemampuan untuk berhubungan dan menarik sumber daya dan dukungan, kemampuan untuk beradaptasi dan memperbaharui diri dan kemampuan untuk menyeimbangkan koherensi dan perbedaan merupakan elemen kapasitas yang dapat ditemukan di semua organisasi atau sistem.

Adapun penjelasan dari masing-masing komponen kapasitas organisasi menurut Baser et al. (2008:27-33) yaitu sebagai berikut ;

- a. Kemampuan untuk berkomitmen dan terlibat (*Capability to commit and engage*) berkaitan dengan kemauan untuk memilih, untuk memberdayakan

dan menciptakan ruang pada organisasi dan mewujudkannya dalam tindakan. Sebuah organisasi dapat mulai mengimplementasikan suatu program dengan energi dan komitmen, tetapi kemudian kehilangan daya tarik dan kemauan untuk bertindak.

- b. Kemampuan untuk melakukan tugas-tugas teknis, penyampaian layanan dan logistik (*Capability to carry out technical, service delivery and logistical tasks*) merupakan kemampuan organisasi yang ditekankan pada manajemen kinerja yang efektif dalam bentuk pemberian layanan yang lebih baik dengan cara-cara fungsional dan instrumental untuk memenuhi serangkaian tujuan dan memenuhi mandatnya.
- c. Kemampuan untuk beradaptasi dan memperbaharui diri (*Capability to adapt and self renew*) merupakan kemampuan suatu organisasi atau sistem untuk menguasai perubahan dan mengadopsi ide-ide baru.
- d. Kemampuan untuk berhubungan dan menarik sumber daya dan dukungan (*Capability to relate and to attract resources and support*) merupakan kemampuan untuk membangun, mengelola, dan mempertahankan hubungan yang diperlukan agar organisasi dapat bertahan.
- e. Kemampuan untuk menyeimbangkan koherensi dan perbedaan (*Capability to balance diversity and coherence*) merupakan kemampuan organisasi menemukan cara untuk menyeimbangkan keanekaragaman dan koherensi, dan untuk mendorong stabilitas dan inovasi. Kemampuan untuk menyeimbangkan koherensi dan perbedaan berkaitan dengan kemampuan

organisasi untuk berkomunikasi, membangun koneksi, mengelola keanekaragaman, mengelola paradoks dan ketegangan dalam organisasinya.

Pendapat Baser et al. inilah yang paling relevan dalam menilai kapasitas Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dalam penyelenggaraan Program Indonesia Pintar dikarenakan kategori-kategori penilaiannya yang jelas untuk melihat bagaimana organisasi tersebut menyelenggarakan Program Indonesia Pintar yang merupakan program pemerintah pusat yang melibatkan organisasi tersebut dalam pelaksanaannya di tingkat pendidikan dasar yaitu jenjang SMP di Kabupaten Bekasi.

2.1.4 Dinas Pendidikan Kabupaten

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten

Dinas Pendidikan mempunyai peran :

- Penyusunan dan perumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis/operasional di bidang pendidikan umum dan pendidikan luar sekolah;
- Penetapan kebijakan operasional pendidikan di kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi;
- Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;

- Pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis/operasional pendidikan umum dan pendidikan luar sekolah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kabupaten;
- Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal;
- Pemberian izin pendirian dan pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/ penyelenggaraan pendidikan non formal;
- Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional;
- Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keuangan lokal;
- Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar menengah;
- Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi;
- Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional;
- Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat kabupaten;

- Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya;
- Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya;
- Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan dan evaluasi terhadap peningkatan kemampuan dan potensi pendidikan usia dini, pendidikan taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah/ kejuruan dan pendidikan luar sekolah;
- Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar;
- Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
- Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar;
- Sosialisasi dan fasilitas implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar;
- Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar;
- Pelaksanaan penataan, pemenuhan dan evaluasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan;

- Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal;
- Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;
- Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal;
- Perencanaan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai kewenangannya;
- Pengangkatan dan penempatan pendidikan dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya;
- Pemindahan pendidikan dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil di kabupaten;
- Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidikan dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal;
- Pemberhentian dan pengembangan pendidikan dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal;
- Pemberhentian pendidikan dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan

menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan;

- Pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal;
- Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten;
- Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kabupaten;
- Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jelas pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal skala kabupaten;
- Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal skala kabupaten;
- Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal;
- Supervisi dan fasilitas satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
- Pengawasan dan pengendalian teknis bidang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah/kejuruan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, pendidikan non formal, pembinaan guru dan siswa berbakat dan berprestasi;
- Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar pendidikan;

- Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu;
- Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kabupaten;
- Penyelenggaraan pengendalian mutu pendidikan dan pelayanan administratif;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.5 Pendidikan dalam Kebijakan Publik

Pendidikan merupakan instrument penting yang dapat digunakan negara maju maupun negara berkembang untuk melakukan perubahan sosial. Sebuah negara tidak akan bisa mengembangkan yang lain bila tidak mampu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan warga negaranya dan memanfaatkannya secara efektif dalam ekonomi sosial. Secara luas, pendidikan dianggap sebagai kunci untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, jalan menuju kemakmuran ekonomi, sarana untuk memerangi pengangguran, fondasi keadilan sosial, dan penyebaran sosialisasi politik dan vitalitas budaya. Bahkan Schultz (dalam Chimombo, 2005:130) mengemukakan kualitas populasi dan pengetahuan merupakan penentu utama kesejahteraan masa depan umat manusia.. Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan mampu membuat perubahan sosial dan bermuara pada perbaikan ekonomi masyarakat dalam suatu Negara.

Terkait dengan pemahaman teoritis mengenai pendidikan, beberapa ahli mengemukakan pandangannya. Donald (dalam Samsudin, 2015:24) berpendapat

bahwa pendidikan merupakan suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk merubah tabiat (*behavior*) manusia. Dalam perspektif sosial, Fattah (2012:43) mengemukakan bahwa pendidikan akan melahirkan insan-insan terpelajar yang mempunyai peranan penting dalam proses perubahan sosial di dalam masyarakat. Pendidikan menjadi faktor determinan dalam mendorong percepatan mobilitas masyarakat, yang pengaruh pada pembentukan formasi sosial baru. Formasi sosial baru ini terdiri atas lapisan masyarakat kelas menengah terdidik yang menjadi elemen penting dalam memperkuat daya rekat sosial.

Pendidikan sebagai hal yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan manusia, membuat kehadiran pemerintah sangat diperlukan untuk menjamin masyarakatnya dapat mengakses pendidikan tersebut. Pendidikan merupakan barang publik yang memerlukan pengendalian pemerintah melalui kebijakan pendidikan yang dibuat pemerintah itu sendiri. Kebijakan pendidikan dapat dimaknai sebagai kebijakan publik di bidang pendidikan, bahkan saat ini pendidikan dianggap sebagai pusat wilayah kebijakan publik

Kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi, bagi negara-bangsa dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi menurut Olsen et al. (dalam Nugroho, 2008:267). Salah satu argumen utamanya adalah bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi. Demokrasi yang memberikan hasil adalah demokrasi yang didukung oleh pendidikan. (dalam Anwar, 2014:486) mengemukakan kebijakan pendidikan sebagai berikut:

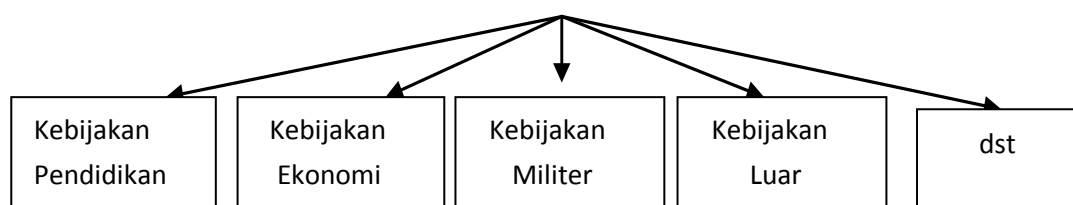
*“Educational policy is judgment, derived from some system of values and some assesment of situational faktors, operating within institutionalized adecation as a general plan for guiding decision regarding means of attaining desired educational objectives.”*Kebijakan pendidikan sebagai suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian atas faktor-faktor yang bersifat situasional, pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengopersikan pendidikan yang bersifat melembaga”

Kebijakan pendidikan ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan negara-bangsa di bidang pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan Negara-bangsa secara keseluruhan Nugroho dan Tilaar (2008:268) mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik atau kebijakan pembangunan. Hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.3

Kebijakan Pendidikan sebagai Bagian Kebijakan Pembangunan

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN



Sumber : Nugroho (2008:269)

Dari bagan sebelumnya dapat diketahui bahwa dalam kebijakan pembangunan suatu negara, pendidikan tidak terlepas dari perhatian *policy*

makerdalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Wibawa (2003:4), dalam mengoperasionalkan kebijakan publik baik pendidikan, ekonomi, militer, dan lainnya, pemerintah mengintepretasikan kebijakan menjadi. Adapun program dalam administrasi publik merupakan sederetan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Suatu program merupakan kegiatan yang direncanakan maka tentu saja perencanaan itu diarahkan pada pencapaian tujuan.

Dengan demikian program itu bertujuan dan keberhasilannya dapat diukur. Adapun ciri-ciri program yang baik menurut Tjokroamidjojo (1995:181) yaituterdapat tujuan yang dirumuskan secara jelas, adanya penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin, terdapat pengukuran ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungankeuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut, adanya hubungan dengan kegiatan dalam usaha pembangunan dan program lainnya, suatu program tidak dapat berdiri sendiri,terdapatberbagai upaya dibidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan, dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut.

Oleh karena itu dalam menentukan suatu program haruslah dirumuskan secara matang agar menghasilkan program yang solutif terhadap masalah yang ada.Maka dapat disimpulkan program merupakan kegiatan yang direncanakan secara matang untuk mengoperasionalkan suatu kebijakan agar kebijakan yang ada dapat tercapai.

2.1.6 Kemiskinan sebagai Penghambat Aksesibilitas Pendidikan

Negara-negara di dunia menghadapi suatu kondisi dan status yang berbeda satu sama lain. Kondisi tersebut yaitu adanya Negara maju dan berkembang, adanya Negara makmur dan Negara miskin. Negara yang dapat menguasai di segala sektor membawa Negara tersebut kepada status Negara maju/makmur. Lantas, negara yang tidak mampu akan tertinggal dan kemiskinan akan mengikuti masyarakat dan negaranya.

Kemiskinan menurut Houghton (2012:1) adalah “kurangnya kesejahteraan”, secara konvensional mengaitkan kesejahteraan terutama dengan kepemilikan barang, sehingga masyarakat miskin diartikan sebagai mereka yang tidak memiliki pendapatan atau konsumsi yang memadai untuk membuat mereka berada di atas ambang minimal kategori sejahtera. Akhirnya kemiskinan dipandang dengan melihat masalah keuangan. Adapun yang menjadi faktor penyebab kemiskinan menurut Houghton (2012:165) yaitu sebagai berikut:

a. Karakteristik wilayah.

Baiknya pemerintahan, sebuah kebijakan lingkungan yang bijaksana, stabilitas ekonomi, politik dan pasar, partisipasi massa, keamanan global dan wilayah, serta peradilan yang adil, fungsional, dan efektif mempengaruhi tingkat kemiskinan suatu wilayah,

b. Karakteristik Masyarakat.

Kemiskinan dipengaruhi oleh rata-rata perkembangan sumber daya manusia, akses pada pekerjaan, pergerakan dan keterwakilan sosial dan distribusi tanah.

c. Karakteristik Rumah Tangga

Kemiskinan dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga, pengangguran dalam keluarga (pengangguran muda dan tua), aset yang dimiliki keluarga (tanah, perumahan dan perhiasan), dan rata-rata kesehatan dan pendidikan para anggota keluarga)

d. Karakteristik Individu

Usia, Pendidikan, status pekerjaan, status kesehatan dan etnis sangat mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Adanya persoalan kemiskinan yang terjadi di banyak negara dapat dilihat penyebabnya dengan mengidentifikasi beberapa aspek yang dikemukakan oleh Sumardjoko (2018:6) yaitu sebagai berikut:

1. Kemiskinan disebabkan adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang memunculkan lahirnya kesenjangan distribusi pendapatan masyarakat. Masyarakat miskin mempunyai sumberdaya yang jumlahnya terbatas dan berkualitas rendah.
2. Kemiskinan terjadi akibat adanya perbedaan kualitas sumber kemampuai daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah mengindikasikan produktivitas kerja yang rendah. Hal ini mengakibatkan pemberian upah yang minim. Beberapa pemicu kualitas sumber daya manusia yang rendah antara lain tingkat

pada terjadinya diskriminasi dalam pelaksanaan pendidikan di masyarakat.

3. Perbedaan akses dalam perolehan modal.

Dari ketiga aspek penyebab kemiskinan diatas, ketiganya bermuara pada teori lingkaran kemiskinan atau *vicious circle of poverty*. Teori tersebut mengemukakan bahwa yang menyebabkan terjadinya kemiskinan yakni keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan ketidak cukupan modal. Rendahnya produktivitas berimplikasi pada kecilnya pendapatan yang diterima. Kondisi ini akan mengakibatkan lemahnya investasi dan tabungan. Secara umum karakteristik kemiskinan ditandai dengan lemahnya kemampuan berusaha dan terbatasnya akses pada kegiatan ekonomi. Kondisi ini akan mengakibatkan ketertinggalan dari masyarakat lain yang memiliki potensi ekonomi lebih tinggi. Dengan adanya ketertinggalan tersebut, menyebabkan akses masyarakat terhadap berbagai sektor akan sulit.

Amartya Sen (dalam Nugroho, 2008) mengemukakan bahwa masyarakat harus menikmati kebebasan yang merupakan syarat mutlak perwujudan hak asasi manusia. Apabila kebebasan dibatasi, maka hal tersebut akan berkaitan langsung dengan kemiskinan ekonomi yang merampok rakyat untuk bebas menolak kelaparan, gizi yang buruk, penyakit menular, pendidikan yang rendah dan berbagai tuntutan kesejahteraan.

Kemiskinan yang merupakan ketertinggalan dari sekelompok orang, menyebabkan akses masyarakat terhadap berbagai sektor akan sulit. Contohnya

akses terhadap pendidikan, sehingga pemerintah perlu hadir untuk membuat masyarakat yang tidak mampu mengakses menjadi mampu.

2.1.7 Program Indonesia Pintar (PIP)

PIP adalah Program Indonesia Pintar. Bagi yang masih awam, PIP merupakan program pemerintah bentuk kerjasama antara tiga kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Agama (Kemenag) untuk memajukan pendidikan. PIP menjadi program khusus untuk membantu anak sekolah yang berasal dari keluarga kategori kurang mampu atau miskin. Bantuan yang diberikan berupa bantuan finansial. Harapannya, dengan PIP anak dari keluarga kurang mampu tersebut lebih terjamin pendidikannya. Sehingga, angka putus sekolah bisa menjadi lebih ditekan.

PIP tidak saja diberikan untuk kebutuhan pendidikan formal (SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA). Sebaliknya, PIP juga bisa dimanfaatkan untuk para siswa yang menempuh pendidikan non formal (Paket A hingga Paket C serta kursus terstandar). Namun pada kenyataannya, sebagian orang lebih mengenal arti PIP dengan sebutan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Nantinya, siswa pemegang KIP inilah yang berhak mendapatkan bantuan dana untuk pendidikan.

Program Indonesia Pintar atau PIP diberikan pada siswa di setiap jenjang pendidikan. Namun tentu, besaran dana bantuan setiap jenjang pendidikan berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing jenjang. Berikut besaran jumlah dana bantuan PIP, masih dilansir dari indonesiapintar.kemdikbud.go.id:

1. Siswa peserta didik SD/MI/Paket A mendapatkan Rp450.000,- per tahun;
2. Siswa peserta didik SMP/MTs/Paket B mendapatkan Rp750.000,- per tahun;
3. Siswa peserta didik SMA/SMK/MA/Paket C mendapatkan Rp1.000.000,- per tahun.

PIP disalurkan melalui media Kartu Indonesia Pintar (KIP). Itu artinya, untuk dapat memanfaatkan PIP, siswa peserta didik harus memiliki kartu tersebut. KIP sebenarnya bisa didistribusikan secara langsung dari dinas terkait melalui pihak sekolah. Sehingga, terkadang penyebarannya bisa saja tidak merata. Terdapat siswa yang berasal dari keluarga miskin tidak mendapatkannya. Jika sudah demikian, maka selain arti PIP penting juga untuk tahu cara mengajukan PIP. Berikut adalah langkah-langkahnya.

- Siswa dapat mendaftar dengan membawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) orang tuanya.
- Namun apabila tidak memiliki, orangtua wali bisa membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT/RW dan Kelurahan/Desa.
- Berikutnya, bawa KKS atau SKTM ke sekolah untuk diajukan ke Dinas Pendidikan setempat.
- Selanjutnya, Dinas Pendidikan akan memproses dan memverifikasi data-data tersebut untuk kemudian menerbitkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang akan diserahkan kepada peserta didik.

PIP jadi salah satu program unggulan pemerintah di bidang pendidikan. Setiap siswa miskin berhak mendapatkan bantuan PIP. Bahkan, bagi yang belum terdaftar, bisa mendaftarkan dirinya selama memenuhi syarat ketentuan. Kendati

terkesan diberikan secara cuma-cuma, sebenarnya ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi penerima PIP.

Oleh sebab itu, mengetahui arti PIP tidak akan lengkap tanpa tahu kewajiban-kewajibannya. Berikut beberapa kewajiban yang harus dipenuhi penerima PIP.

- Menyimpan dan menjaga Kartu Indonesia Pintar dengan baik.
- Dana Bantuan PIP harus digunakan untuk keperluan yang relevan (kebutuhan pendidikan), misalnya membeli perlengkapan sekolah, mengikuti kursus, dan sebagainya.
- Siswa penerima juga harus terus belajar dan bersekolah (tidak putus sekolah) dengan rajin, disiplin dan tekun.
- Jika kartu KIP hilang atau mengalami kerusakan, segera laporkan hal tersebut ke kontak pengaduan PIP.
- Informasikan nomor KIP yang hilang beserta kartu identitas agar penggantian kartu baru dapat diproses.

Siswa peserta didik pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) perlu melakukan pengecekan saldo. Sebab seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, PIP diwujudkan dalam dana bantuan. Sehingga, apabila ada ketidaksesuaian jumlah, pemegang KIP bisa melakukan tindakan.

Cara untuk mengecek saldo KIP juga sangat mudah. Hal tersebut bisa dilakukan melalui browser baik lewat HP maupun laptop. Agar lebih jelas, kalian bisa ikuti langkah-langkah berikut ini.

- Buka browser di hp atau laptop kalian, kemudian akses situs jaga.id.

- Berikutnya, silakan login dengan akun dan password yang sudah terdaftar.
- Kemudian, lanjutkan dengan klik menu Pelayanan Publik.
- Setelah itu, pilih menu Pendidikan.
- Langkah selanjutnya, isi kolom data diri (nama, jenjang pendidikan, dan domisili).
- Jika sudah, klik opsi Tampilkan.
- Selanjutnya secara otomatis akan ditampilkan informasi dan data mengenai tempat kalian menempuh pendidikan.

Pendidikan adalah suatu kegiatan yang melekat kepada setiap kehidupan bersama atau dalam bahasa politik disebut sebagai “Negara Bangsa”, dalam rangka menjadikan kehidupan bersama tersebut mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan kehidupan. Tujuan pendidikan disesuaikan dengan dimensi-dimensi kehidupan manusia.

Setiap dimensi kehidupan (pembangunan) memiliki tujuan masing-masing dan semua dimensi itu motor penggeraknya adalah manusia yang memilih, menentukan, melaksanakan pilihannya guna untuk mencapai tujuan hidup, baik tujuan manusia secara umum maupun tujuan hidup manusia secara spesifik.. Demi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, Pemerintah menelurkan berbagai program agar proses belajar mengajar dapat berjalan lebih efektif, salah satunya adalah Program Indonesia Pintar.

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan berupa uang tunai yang diberikan oleh Pemerintah kepada peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu yang mengalami kesulitan untuk membayar biaya pendidikan. Seperti

yang tertuang pada Permendikbud 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar, dana PIP dapat digunakan oleh peserta didik untuk memenuhi segala kebutuhan pendidikan seperti membeli perlengkapan sekolah, biaya transportasi, uang saku hingga untuk uji kompetensi.

Tujuan dari PIP itu sendiri yaitu untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga tidak mampu agar dapat menyelesaikan pendidikannya, baik melalui jalur formal seperti SD hingga SMA/SMK, maupun jalur non formal yaitu Paket A, Paket C dan pendidikan khusus.

Melalui program PIP tersebut, Pemerintah berupaya untuk mencegah peserta didik putus sekolah dan lewat PIP, Pemerintah juga berharap dapat membuat peserta didik yang putus sekolah untuk dapat melanjutkan kembali pendidikannya.

Tujuan Program Indonesia Pintar Seperti yang sudah dijelaskan kalau tujuan PIP adalah untuk memberikan bantuan kepada peserta didik kurang mampu agar dapat menyelesaikan pendidikannya. Dari tujuan tersebut, PIP dilaksanakan berdasarkan prinsip yang sudah ditentukan, seperti:

1. Efisien yaitu menggunakan dana yang ada untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan dalam waktu yang cepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Efektif yaitu dana yang diberikan dapat digunakan untuk kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat sebesar- besarnya sesuai dengan sasaran.
3. Transparan yaitu adanya keterbukaan agar masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai PIP.

4. Akuntabel yaitu segala pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Kepatutan yaitu kegiatan dapat dilaksanakan dengan realistis dan proporsional.
6. Manfaat yaitu pelaksanaan kegiatan dapat diselenggarakan dengan sejalan sesuai prioritas nasional.

Sasaran Program Indonesia Pintar Agar dana bantuan PIP dapat berjalan sesuai yang sudah ditetapkan, Pemerintah menetapkan beberapa kriteria untuk peserta didik yang bisa mendapatkan bantuan PIP. Yakni:

1. Anak sekolah usia 6 hingga 21 tahun.
2. Peserta didik merupakan pemegang KIP (Kartu Indonesia Pintar).
3. Peserta didik berasal dari keluarga Program Keluarga Harapan.
4. Peserta didik dari keluarga Kartu Keluarga Sejahtera.
5. Peserta didik merupakan anak yatim piatu/yatim/piatu/panti asuhan.
6. Peserta didik terkena dampak bencana alam.
7. Peserta didik tidak bersekolah karena tidak memiliki biaya.
8. Peserta didik memiliki kelainan fisik, korban musibah, orangtua terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berada di daerah konflik hingga berasal dari keluarga terpidana.

Dana yang diberikan harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, baik untuk membeli perlengkapan belajar hingga uang saku peserta didik. Untuk dapat mengklaim bantuan PIP tersebut, ada sejumlah dokumen yang harus dipersiapkan oleh peserta didik, yaitu:

1. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

2. Kartu Keluarga (KK)
3. Akta Kelahiran
4. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
5. Surat Pemberitahuan Penerima BSM dari kepala sekolah.

Selain beberapa dokumen tersebut, ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan oleh peserta didik seperti penerima KIP harus terdaftar di lembaga pendidikan formal (SD/SMP/SMA/SMK) maupun non-forma (PKBM/SKB/LKP). Tak hanya itu, KIP milik peserta didik juga harus terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar, antara lain:

1. Peserta didik dapat melakukan pendaftaran di lembaga pendidikan terdekat dengan membawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
2. Jika tidak memiliki KKS, orangtua dapat mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di RT/RW dan kelurahan.
3. Sekolah akan mendata peserta dan dikirimkan ke Dinas Pendidikan kota setempat.
4. Sementara untuk sekolah yang berada di naungan Kemendikbud diharuskan untuk memasukkan data peserta didik di aplikasi Dapodik.
5. Jika peserta didik lolos pendaftaran, maka pengambilan dana PIP dapat dilakukan secara perorangan atau kolektif. Pengambilan kolektif untuk pelajar yang tinggal di wilayah yang sulit mengakses bank.

Untuk mendukung pendidikan di Indonesia, Pemerintah juga memberikan bantuan kepada sekolah melalui program dan BOS (Bantuan

Operasional Sekolah). Program tersebut ditujukan agar satuan pendidikan dapat memenuhi kebutuhan belajar mengajar.

2.2. Tabel 2.3 Hasil Penelitian Sebelumnya

No.	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian ini
1.	Eric Zakaria (2018)	Peran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Di Kabupaten Cilacap Tahun 2017	Pemerintah Kabupaten Cilacap telah melaksanakan Program Indonesia Pintar walaupun memang masih ada kekurangan dan tidak maksimal dalam penyerapan dana PIP nya.	Persamaan dengan Penelitian ini adalah sama-sama focus pada peran pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar. Perbedaannya Terletak pada lokus penelitian
2.	Distianto Agung D.N.P (2016)	Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Cor Kuningan Di Kabupaten Jombang	Pemerintah Kabupaten Jombang telah melaksanakan tugasnya dalam mengembangkan UKM di bidang produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Pemkab Jombang juga telah menjalankan perannya sebagai fasilitator, katalis dan regulator. Partisipasi pelaku pengrajin kuningan cor juga telah terlibat secara aktif dalam rangka untuk mengembang	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama fokus pada peran pemerintah daerah Perbedaannya terletak pada topik dan lokus pembahasan UMKM karena penelitian ini membahas tentang PIP di Kabupaten Bekasi.

			kan UKM, diwujudkan dalam kegiatan pengrajin yang mencerminkan partisipasi dalam perencanaan,	
3.	Muh Asran Labaran, Lukman Hakim, Rudi Hardi (2016)	Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Kakao di Desa Taan Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju	Dari hasil penelitian, dikatakan bahwa peran pemerintah tersebut telah dapat merealisasikan berbagai program seperti peningkatan kesejahteraan sosial. Faktor pendukungnya adalah adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan bantuan produksi dan modal . Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurangnya kelembagaan yang menanungi masyarakat dalam pembudidayaan tanaman kakao. Ada 3 peran pemerintah dalam penelitian ini, yang pertama AMP Kota Serang sebagai penerima informasi. Kedua, Disperindagkop serta Bappeda Kota Serang sebagai pengambil keputusan. Ketiga, UPTD Pasar, DTK, BLHD, dan DPKD Kota Serang sebagai	Persamaan dengan penelitian ini yaitu fokus terhadap peran pemerintah daerah Perbedaannya adalah pada penelitan saya hanya berfokus pada peran pemerintah daerah

			pemberi pertimbangan.	
4.	Abdul Halik (2014)	Peran Pemerintah Kota Serang dalam Kebijakan Pengembangan Pasar Tradisional	Dari hasil penelitian, dikatakan bahwa peran pemerintah tersebut telah dapat merealisasikan berbagai program seperti peningkatan kesejahteraan sosial. Faktor pendukungnya adalah adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan bantuan produksi dan modal . Sedangkan faktor penghambatnya yaitu tidak semua badan penyuluh mau menerima dengan mudah adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah.	Persamaan dengan penelitian ini yaitu fokus terhadap peran pemerintah daerah Perbedaannya terdapat pada pembahasan. Jika dalam penelitian saya membahas peran pemerintah dalam Pelaksanaan PIP di Kabupaten Bekasi Jejang SMP
5.	Irma Kumalasari (2016)	Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani lada putih di desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur	Dari hasil penelitian, dikatakan bahwa peran pemerintah tersebut telah dapat merealisasikan berbagai program seperti peningkatan kesejahteraan sosial. Faktor pendukungnya adalah adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan bantuan produksi dan modal .	Persamaan dengan penelitian ini yaitu fokus terhadap peran pemerintah daerah Perbedaannya terdapat pada pembahasan. Jika dalam penelitian saya membahas peran pemerintah dalam Pelaksanaan PIP di Kabupaten Bekasi Jejang SMP

			Sedangkan faktor penghambatnya yaitu tidak semua badan penyuluh mau menerima dengan mudah adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah.	
6.	Putri Kesuma Wardani (2021)	Peran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif Pada Sektor Kerajinan Di Kabupaten Batu Bara	Dari hasil penelitian, dikatakan bahwa peran pemerintah tersebut telah dapat merealisasikan berbagai program seperti peningkatan kesejahteraan sosial. Faktor pendukungnya adalah adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan bantuan produksi dan modal . Sedangkan faktor penghambatnya yaitu tidak semua badan penyuluh mau menerima dengan mudah adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah.	Persamaan dengan penelitian ini yaitu fokus terhadap peran pemerintah daerah Perbedaannya terdapat pada pembahasan. Jika dalam penelitian saya membahas peran pemerintah dalam Pelaksanaan PIP di Kabupaten Bekasi Jejang SMP

2.3. Kerangka Pemikiran

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah program bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dalam membiayai pendidikan. Penelitian ini dilakukan

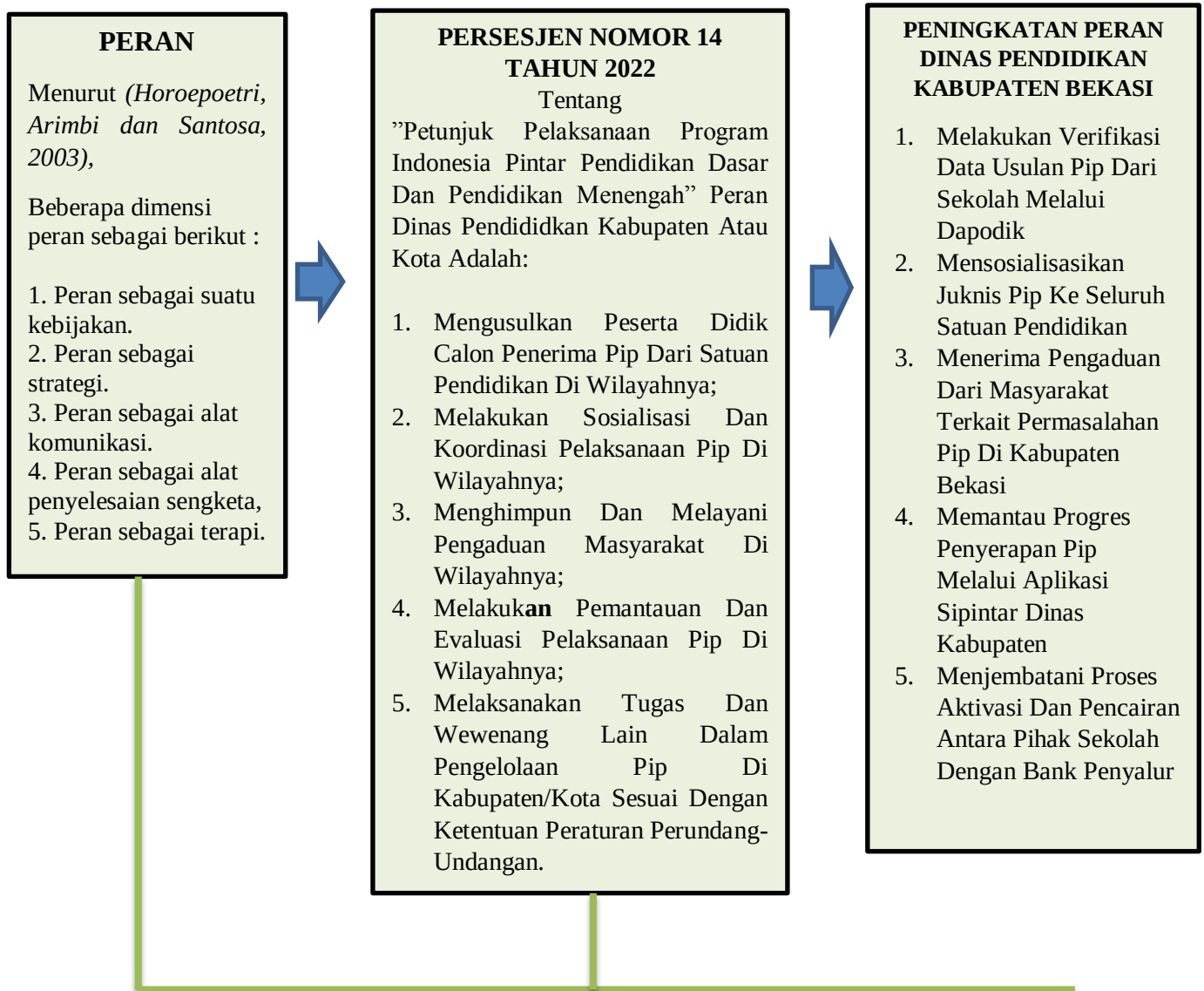
di Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi di wilayah Kabupaten Bekasi, untuk mengetahui Peran Dinas Pendidikan Kabupaten dalam Pelaksanaan Sosialisasi PIP, dimana masih didapati beberapa permasalahan berupa bahwa informasi terkait PIP masih belum begitu baik, dikarenakan masih ditemukan beberapa siswa.siswi yang tergolong keluarga mampu menerima kebijakan ini, sehingga banyak dari siswa/siswi yang kurang mampu mengalai kesusahan dalam administrasi sekolah. Beberapa orang tua juga mengaku kurangnya informasi dari pemerintah soal kebijakan PIP ini, pendataan yang masih perlu untuk ditingkatkan.

Penelitian tentang Peran Dinas Pendidikan dalam Pelaksanaan program PIP jenjang SMP di Kabupaten Bekasi akan dianalisis dengan menggunakan model Pengertian peran menurut Horoepoetri, Arimbi dan Santosa, (2003), yang memiliki 5 dimensi yaitu peran sebagai kebijakan, peran sebagai strategi, peran sebagai alat komunikasi, peran sebagai penyelesaian sengketa, dan peran sebagai terapi.

Dari hal diatas lebih lanjut kita hubungkan dengan Pemerintahan atau Lembaga maka Peran yang akan di teliti adalah merupakan Tugas dan Wewenang Dinas Pendidikan Kabupaten dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Jenjang SMP di Bekasi Provinsi Jawa Barat yang mengacu ke Persesjen Nomor 14 Tahun 2022 tentang “ Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Menengah” dan kerangka berpikir yang akan peneliti tuangkan meliputi tahapan sebagai berikut yang tertuang dalam gambar Kerangka Pemikiran :

Tabel 2.4

Kerangka Pemikiran



2.4. Hipotesis

Menurut Mundilarso (2004) pengertian Hipotesis adalah suatu bentuk pernyataan yang sifatnya masih sangat lemah, sehingga perlu dilakukan pengujian

lagi untuk membuktikannya lagi dengan teknik atau analisis tertentu. Berdasarkan atas pengertian tersebut dalam penelitian ini dapat disampaikan hipotesis sebagai berikut:

1. Peran Dinas Pendidikan Dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) Jenjang SMP di Kabupaten Bekasi belum optimal karena belum merata ke seluruh masyarakat yang berhak mendapatkan Program tersebut.
2. Faktor pendorong dan penghambat Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) Jenjang SMP di Kabupaten Bekasi Dalam upaya memberikan Akses Pendidikan Dasar yang layak bagi masyarakat Kabupaten Bekasi.
3. Upaya Dinas Pendidikan yang sudah dilaksanakan agar Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) Jenjang SMP di Kabupaten Bekasi terlaksana dengan baik sudah berjalan sesuai aturan akan tetapi masih kurang optimal dalam pelayanan pendidikan gratis kepada masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan kerangka atau perincian prosedur kerja yang akan dilakukan pada waktu meneliti, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran dan arah dalam melakukan penelitian tersebut, serta memberikan gambaran jika penelitian itu telah selesai penelitian tersebut diberlakukan. Desain penelitian yang baik dapat memudahkan kita dalam melakukan penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneiti pada kondisi obyek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Prosedur-prosedur kualitatif memiliki pendekatan yang lebih beragam dalam penelitian akademik ketimbang metode-metode kuantitatif. Penelitian kualitatif juga memiliki asumsi-asumsi filosofis, strategi-strategi penelitian, dan metode-metode pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang beragam. Meskipun prosesnya sama, prosedur-prosedur kualitatif tetap mengandalkan data berupa teks dan gambar, memiliki langkah-langkah unik dalam analisis datanya, dan bersumber dari strategi-strategi penelitian yang berbeda-beda.

Menurut Creswell (2015:225), karakteristik penelitian kualitatif antara lain:

1. Lingkungan alamiah; para peneliti kualitatif cenderung mengumpulkan data lapangan di lokasi di mana para partisipan mengalami isu atau masalah yang

akan diteliti. Peneliti kualitatif tidak membawa individu-individu ini ke dalam laboratorium, tidak pula membagikan instrumen-instrumen kepada mereka. Informasi yang dikumpulkan dengan berbicara langsung kepada orang-orang dan melihat mereka bertingkah laku dalam konteks natural inilah yang menjadi karakteristik utama peneliti kualitatif. Dalam setting yang alamiah, para peneliti kualitatif melakukan interaksi *face-to-face* sepanjang penelitian.

2. Peneliti sebagai instrumen kunci; para peneliti kualitatif mengumpulkan sendiri data melalui dokumentasi, observasi perilaku, atau wawancara dengan para partisipan. Mereka bisa saja mengumpulkan sejenis instrumen untuk mengumpulkan data tetapi diri merekalah yang sebenarnya menjadi satu-satunya instrumen dalam mengumpulkan informasi. Mereka pada umumnya tidak menggunakan kuesioner atau instrumen yang dibuat oleh peneliti lain.
3. Rancangan yang berkembang, bagi para peneliti kualitatif, proses penelitian selalu berkembang dinamis. Hal ini berarti bahwa rencana awal penelitian tidak bisa secara ketat dipatuhi. Semua tahap dalam proses ini bisa saja berubah setelah peneliti masuk ke lapangan dan mulai mengumpulkan data. Misalnya, pertanyaan-pertanyaan bisa saja berubah, strategi pengumpulan data juga bisa berganti, dan individu-individu yang diteliti serta lokasi-lokasi yang dikunjungi juga bisa berubah sewaktu-waktu. Gagasan utama di balik penelitian kualitatif sebenarnya adalah mengkaji masalah atau isu dari para partisipan dan melakukan penelitian untuk memperoleh informasi mengenai masalah tersebut.

4. Beragam sumber data; para peneliti kualitatif biasanya memilih mengumpulkan data dari beragam sumber, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, ketimbang hanya bertumpu pada satu sumber data saja. Kemudian, peneliti mereview semua data tersebut, memberikannya makna, dan mengolahnya ke dalam kategori-kategori atau tema-tema yang melintasi semua sumber data.
5. Analisis data induktif; para peneliti kualitatif membangun pola-pola, kategori-kategori, dan tema-temanya dari bawah ke atas dengan mengolah data ke dalam unit-unit informasi yang lebih abstrak. Proses induktif ini mengilustrasikan usaha peneliti dalam mengolah secara berulang-ulang membangun serangkaian tema yang utuh. Proses ini juga melibatkan peneliti untuk bekerjasama dengan para partisipan secara interaktif sehingga partisipan memiliki kesempatan untuk membentuk sendiri tema-tema dan abstraksi-abstraksi yang muncul dari proses ini.
6. Perspektif teoritis; para peneliti kualitatif seringkali menggunakan perspektif tertentu dalam penelitian mereka, seperti konsep kebudayaan, etnografi, perbedaan-perbedaan gender, ras, atau kelas yang muncul dari orientasi-orientasi teoritis. Terkadang pula penelitian dapat diawali dengan mengidentifikasi terlebih dahulu konteks sosial, politis, atau historis dari masalah yang akan diteliti.
7. Bersifat penafsiran; penelitian kualitatif merupakan salah satu bentuk penelitian interpretif di mana didalamnya para peneliti kualitatif membuat suatu interpretasi atas apa yang mereka lihat, dengar, dan pahami.

Interpretasi-interpretasi mereka bisa saja berbeda dengan latar belakang, sejarah, konteks, dan pemahaman-pemahaman mereka sebelumnya. Setelah laporan penelitian diterbitkan, barulah para pembaca dan para partisipan yang melakukan interpretasi, yang seringkali berbeda dengan interpretasi peneliti. Karena pembaca, partisipan, dan peneliti sama-sama terlibat dalam proses interpretatif ini, tampaknya bahwa penelitian kualitatif memang menawarkan pandangan-pandangan yang beragam atas suatu masalah.

8. Pandangan menyeluruh; para peneliti kualitatif berusaha membuat gambaran kompleks dari suatu masalah atau isu yang diteliti. Hal ini melibatkan usaha pelaporan perspektif-perspektif, pengidentifikasian faktor-faktor yang terkait dengan situasi tertentu, dan secara umum usaha pensketsaan atas gambaran besar yang muncul. Untuk itulah para peneliti kualitatif diharapkan dapat membuat suatu model visual dari berbagai aspek mengenai proses atau fenomena utama yang diteliti.

Locke dalam Creswell (2015:229), menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian interpretatif, yang didalamnya peneliti terlibat dalam pengalaman yang berkelanjutan dan terus-menerus dengan para partisipan. Keterlibatan inilah yang nantinya memunculkan serangkaian isu-isu strategi, etis, dan personal dalam proses penelitian kualitatif.

Dengan keterlibatannya dalam masalah seperti ini, peneliti kualitatif berperan untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan latar belakang pribadinya secara reflektif, seperti gender, sejarah, kebudayaan, dan status sosial ekonominya, yang bisa saja turut membentuk interpretasi mereka selama penelitian. Selain itu para

peneliti kualitatif juga berperan memperoleh entri dalam lokasi penelitian dan masalah-masalah etis yang bisa muncul tiba-tiba.

Dengan melihat fenomena atau gejala di lapangan antara satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan dan upaya penulis untuk mengungkapkan data dan makna di balik kenyataan yang ada dengan cara masuk langsung dari subjek penelitian melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

3.2. Ruang Lingkup Operasional Penelitian

Penentuan ruang lingkup dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan batasan dalam pengumpulan data, sehingga dengan pembatasan ini penulis memfokuskan penelitian terhadap masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Selain itu, fokus penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya penelitian. Melalui fokus penelitian suatu informasi di lapangan dipilah-pilah sesuai dengan konteks permasalahan. Moleong (2007:94), menyatakan bahwa ruang lingkup penelitian sangat penting karena:

1. Penetapan fokus penelitian dapat membatasi studi. Dalam hal ini fokus akan membatasi bidang inkuiri, penulis tidak perlu kesana kemari untuk mencari subjek penelitian karena sudah dengan sendirinya dibatasi oleh fokusnya.
2. Penetapan fokus juga berfungsi memenuhi kriteria *inklusi-eksklusif* atau kriteria keluar-masuk suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan.

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah analisis pelayanan, kepuasan dan motivasi masyarakat di Puskesmas Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi.

3.3. Sumber Data Penelitian

Menurut Moleong (2007:98), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang didapat dari informan melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Untuk mendapatkan data dan informasi maka informan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive* atau sengaja dimana informan telah ditetapkan sebelumnya.

1. Informan

Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam kegiatan penelitian mengenai Peran Dinas Pendidikan Dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) Jenjang SMP di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat adalah sebanyak 23 orang. Informan dalam penelitian ini dapat dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi	1
2	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi	1
3	Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi	1
4	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pendidikan Karakter SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi	1
5	Operator Dinas PIP SMP Kabupaten Bekasi	1
6	Kepala Sekolah SMP Negeri dan Swasta di Kabupaten Bekasi	10
Total		15

2. Dokumen

Dokumen sebagai sumber data adalah berbagai arsip, agenda atau berkas-berkas yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini dan sifatnya memberikan tambahan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

3.4. Instrumen Penelitian

Pada tahap ini penulis melakukan proses pengumpulan data yang telah ditetapkan berdasarkan fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Wawancara. Menurut Moleong (2007:99), wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang

memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada informan dengan menggunakan pedoman teknik wawancara. Wawancara akan ditujukan kepada para pihak yang terkait dengan penelitian ini.

2. Observasi. Observasi merupakan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data primer yang diperlukan dengan melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian.
3. Dokumentasi. Dokumen sebagai sumber data adalah berbagai arsip, agenda atau berkas-berkas yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini dan sifatnya memberikan tambahan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Arikunto (2006:158), memberikan penjelasan bahwa: “Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan lain sebagainya.”

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data diperlukan untuk mengolah data yang masih mentah sehingga memberikan arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Dalam penyusunan tesis ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis data yang dilaksanakan dengan jalan menggambarkan, melukiskan dan menguraikan secara mendalam keadaan yang sebenarnya di lapangan atau peristiwa yang terjadi.

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Bikel dalam Moleong (2007:101), adalah: “Upaya yang dilakukan dengan jalan kerja dengan data,

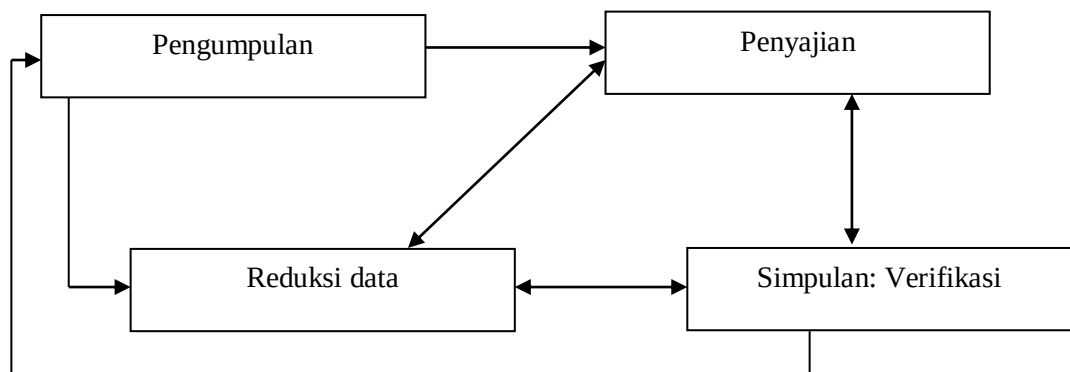
mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.”

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Basrowi dan Suwandi (2008:209), yang mencakup tiga kegiatan yang bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data, merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan.
2. Penyajian data, adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan pembaca dan menarik kesimpulan.
3. Menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin. Dalam tahap ini penulis membuat proposisi yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, pengelompokan data yang telah terbentuk, dan proposisi yang telah dirumuskan.

Gambar 3.1

Bagan Komponen-Komponen dan Proses Analisa Data



Sumber : Miles and Huberman (1992:20)

3.6. Lokasi Penelitian dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi yang merupakan lembaga yang memiliki peran dan fungsi penyelenggaraan Program Indonesia Pintar di tingkat pendidikan dasar di Kabupaten Bekasi. Banyaknya masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan Program Indonesia Pintar baik ketepatan sasaran maupun penyaluran dana PIP maka perlu dilakukan penelitian pada pelaksana program ini yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Dalam penyelenggaraan Program Indonesia Pintar di Kabupaten Bekasi, Dinas Pendidikan memiliki kendala yang terlihat dari kemampuan untuk berkomitmen dan terlibat, kemampuan untuk melakukan tugas-tugas teknis, penyampaian layanan dan logistik, kemampuan untuk beradaptasi dan memperbaharui diri, kemampuan untuk berhubungan dan menarik sumber daya dan dukungan dan kemampuan untuk menyeimbangkan perbedaan dan koherensi.

Dalam menjawab pertanyaan penelitian ini juga didukung oleh informasi dari beberapa Sekolah Menengah Pertama yang ada di beberapa Kecamatan Perbatasan Kabupaten serta mendapat Program Indonesia Pintar dan berhubungan

dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dalam penyelenggaraan program ini. Dasar pemilihan kecamatan tersebut sebagai representatif kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi dengan pertimbangan bahwa Kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Karawang serta memiliki banyak penerima PIP.

3.6.1. Jadwal Penelitian

Jadual penelitian adalah serangkaian waktu dan kegiatan yang direncanakan oleh peneliti dalam penyusunan penelitian, biasanya jadual penelitian disajikan dalam bentuk daftar tabel yang menunjukkan tahapan secara lengkap mulai dari persiapan, pelaksanaan dan penyusunan laporan dengan keterangan waktu yang disertakan di dalamnya.

Adapun Jadwal Penelitian dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.

Jadwal Penyusunan Penelitian Tesis Tahun 2022

No	Jenis Kegiatan	Sept 2022			Okt 2022			Nov 2022			Okt 2023		
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
1	Sidang Proposal												
2	Pengurusan Izin Penelitian												
3	Penyusunan Instrumen Penelitian												
4	Pengujicobaan												

	Instrumen												
5	Pengumpulan Data												
6	Pengolahan dan Analisis Data												
7	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian												
8	Penyajian Laporan Hasil Penelitian												

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi

Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi berdiri pada tahun 2000 (perubahan

nama dari cabang dinas dan kandep), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1995 tentang Perluasan dan Pengembangan Wilayah di Kabupaten/ Kota, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah) yang telah diubah dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, serta dikukuhkan dengan:

1. Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 32 Tahun 2000 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Mengalami perubahan dengan Keputusan Bupati Bekasi Nomor 34 Tahun 2004;
2. Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor : 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (SOTK);
4. Peraturan Bupati Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Laksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi ;
6. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 37 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Laksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
7. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi

Sumber Daya Aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi terbentuk dari

hasil penggabungan (Merger) dari beberapa instansi, antara lain Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dinas P dan K), dan sebagian dari Departemen Penerangan (Deppen) Nama satuan organisasi mengalami perubahan sebanyak 6 (enam) kali; sampai dengan akhir tahun 1997 bernama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud).

Pada awal tahun 1998 sampai dengan pertengahan tahun 2000 diganti menjadi Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), pada akhir tahun 2000 bernama Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi sesuai dengan PERDA Nomor 11 Tahun 2000 serta pada awal tahun 2004 menjadi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bekasi. Pada Tahun 2008 dengan PERDA Nomor 02 Tahun 2008 menjadi Dinas Pendidikan.

Setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi sesudah Otonomi Daerah sudah 11 kali mengalami perubahan kepemimpinan, antara lain:

Tabel 4.1

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi 2001-Sekarang

No	Nama	Masa Jabatan
1	Drs. H. Saripin	2001
2	Drs. H. Muhyiddin, MM, M.BA	2001-2004
3	Dr. Tony Sukasah, Drs, M.Si	2004-2007
4	Drs. H. T.M. Djunaedi. S	2007-2009
5	Dr. Rusdi, M.Biomed	2009-2009
6	Drs. H. Abdur Rofiq, M.Si	2009-2012

No	Nama	Masa Jabatan
7	Drs. H. Rohim Sutisna, M.Pd	2012-2016
8	Drs. Maman Agus Supratman, M.Si	2016-2017
9	Drs. H. Aspuri, M.Pd	2017
10	Drs. Maman Agus Supratman, M.Si	2017-2019
11	Dr. H. Carwinda, M.Si	2019-Sekarang

Sumber Ensiklopedia Dinas Pendidikan Kabuapten Bekasi

4.1.2. Visi dan Misi Dinas Pendidikan

1. Visi

Visi pembangunan yang diusung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi adalah: “Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlak”.

- a. Sumber Daya Manusia yang Cerdas, yang dimaksud adalah suatu kondisi yang diinginkan dimana hasil pendidikan dapat membentuk intelektualitas dan wawasan yang mumpuni sesuai standar kompetensi sehingga dapat merubah seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi memiliki kemampuan menganalisis keadaan/kondisi/potensi dirinya untuk digunakan dalam pembangunan, dan diharapkan tahun 2019 memiliki indeks pendidikan sebesar 91,39. Angka indeks tersebut akan dicapai melalui Angka Melek Huruf 100% dan Angka Rata-rata Lama Sekolah 11 tahun.
- b. Berkarakter, yang dimaksud adalah sebagai kristalisasi dari nilai-nilai seni dan budaya bangsa yang berdampak pada rasa percaya diri yang dimiliki oleh segenap potensi sumber daya pendidikan yang tersedia dan dimanfaatkan secara optimal sehingga menjadi aset dan kekuatan diri untuk dapat berdaya saing tinggi dengan tetap menunjukkan sikap dan perilaku ke-Indonesiannya.

- c. Sumber Daya Manusia Berakhlak, yang dimaksud adalah Sumber Daya Manusia yang memiliki landasan pemahaman nilai-nilai agama yang kuat, serta dapat mengimplementasikan dalam aktivitas kehidupannya, baik di lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan sekolah.

Pernyataan Visi Dinas Pendidikan sepenuhnya mengacu pada pernyataan visi Pemerintah Kabupaten Bekasi yaitu “Manusia Unggul yang Agamis berbasis Agribisnis dan Industri berkelanjutan.” Hal ini dapat dipahami mengingat Dinas Pendidikan merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Bekasi. Dalam konteks tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, visi Dinas Pendidikan memaklumkan bahwa Dinas Pendidikan akan secara harmonis mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui koridor tugas pokok dan fungsinya, yakni pengembangan pendidikan menuju manusia yang cerdas, berakhlak dan berakhlak mulia.

2. Misi

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkanlah misi Dinas Pendidikan yang merupakan alasan keberadaan Dinas Pendidikan di tengah-tengah lingkungannya, pernyataan misi Dinas Pendidikan memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi dan sejalan dengan kebutuhan tuntutan masyarakat. Misi Dinas Pendidikan ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Pelayanan Pendidikan Yang Optimal Kepada Masyarakat.
- 2) Meningkatkan Pemenuhan Fasilitas, Sarana, dan Prasarana Pendidikan Yang Memadai.

- 3) Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Tenaga Pendidik dan Kependidikan.
- 4) Menumbuh kembangkan Kreatifitas Peserta Didik Dalam Menyongsong Masa Depan.
- 5) Mengembangkan Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi dengan Berlandaskan Iman dan Taqwa.

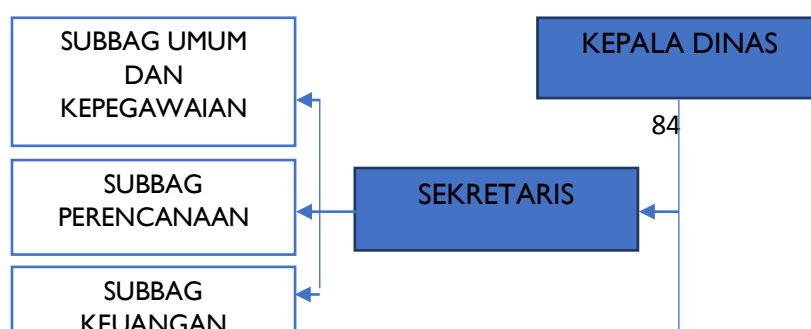
4.1.3. Struktur Organisasi

Berikut ini struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Tabel

4.2

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022



Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi 2022

A. Peran Dinas Pendidikan

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tahun 2017-2022 ada tiga strategi yang diambil dalam penyelenggaraan urusan wajib bidang pendidikan di Kabupaten Bekasi yaitu: (1) Pemerataan dan Perluasan Akses; (2) Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan;

1. Pemerataan dan Perluasan Akses

Indikator yang digunakan untuk mengukur pemerataan dan perluasan akses pendidikan adalah partisipasi masyarakat dalam pendidikan melalui Angka

Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK yaitu Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu.

Sedangkan APM adalah Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan pada perhitungan APK dan APM.

Keterangan	Jenjang		
	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA/SMK
Nasional	108.61	91.52	80.68
Jawa Barat	106.24	90.96	75.31
Kab. Bekasi	106.79	96.03	87.26

Tabel 4.3 APK Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan nasional

Tahun 2022

Sumber: BPS 2022

Pada tahun 2022 APK SD/MI Kabupaten Bekasi sebesar 106.79 persen angka ini diatas nilai capaian Provinsi Jawa Barat namun masih di bawah capaian Nasional. Pada jenjang SMP/MTs dan pendidikan menengah nilai APK Kabupaten Bekasi sudah jauh berada di atas nilai capaian baik Provinsi Jawa Barat maupun Nasional.

Indikator lainnya adalah Angka Partisipasi Murni (APM), APM merupakan Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia

bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian.

Posisi nilai capaian APM jenjang SD/MI Kabupaten Bekasi pada tahun 2018 masih berada di bawah nilai capaian Nasional dan Provinsi Jawa Barat begitu juga dengan jenjang SMP/MTs. Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin rendah tingkat partisipasi pendidikan, pada jenjang SMP/MTs masih ada 27.45 persen anak usia 13- 15 tahun yang belum bersekolah tepat waktu. APM sekolah menengah Kabupaten Bekasi sebesar 64.64 persen atau masih ada anak usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah tepat waktu, meskipun demikian nilai capaian ini lebih tinggi dari nilai Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

2. Mutu dan Relevansi

Sesuai dengan renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, pada tahun 2021 terdapat 61 SD dan 46 SMP yang sudah terakreditasi di Kabupaten Bekasi dengan hasil:

Pada jenjang SD, dari 61 sekolah yang diakreditasi sebanyak 42 sekolah mendapatkan akreditasi A dan 19 sekolah terakreditasi B hal ini menggambarkan kondisi yang positif. Sedangkan pada jenjang SMP dari 46 sekolah yang diakreditasi sebanyak 16 sekolah terakreditasi A, 29 sekolah terakreditasi B dan ada satu sekolah yang terakreditasi C.

Pendidikan tidak hanya berbicara mengenai partisipasi saja, lebih jauh pendidikan harus dapat mengukur mutu dan daya saing pendidikan. Status akreditasi menunjukkan kualitas pengelolaan lembaga pendidikan, berbagai agenda sudah mendorong pendidikan ke arah mutu dan daya saing Berdasarkan hasil evaluasi

akreditasi tahun 2022 yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/madrasah, banyak sekolah di Kabupaten Bekasi yang masuk dalam lima besar dengan nilai tertinggi di Provinsi Jawa Barat.

B. Kondisi Indikator Mikro Pendidikan

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Jumlah lembaga PAUD di Kabupaten Bekasi tahun 2019 sebanyak 1,361 unit dari jumlah tersebut paling banyak berjenis TK dengan 673 unit, sedangkan yang paling sedikit yaitu TPA dengan 12 unit. Jumlah peserta didik yang dilayani sebanyak 45,218 orang dengan jumlah pendidik sebanyak 3,583 orang.

Tabel 4.4. Jumlah Lembaga, Murid dan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Bekasi 2022

Jenis	Jumlah Lembaga	Jumlah Peserta Didik	Jumlah Pendidik
Taman Kanak-kanak (TK)	673	27,550	2,092
Kelompok Bermain (KB)	562	14,579	1,209
Tempat Penitipan Anak (TPA)	12	203	24
Satuan PAUD Sejenis (SPS)	114	2886	258
Kabupaten Bekasi	1,361	45,218	3,583

Sumber: Dapodik 2022

Rasio jumlah peserta pendidik : lembaga paling banyak ditempati oleh TK yaitu 1 lembaga memiliki anak didik sebanyak 41 orang yang paling rendah TPA dengan satu lembaga TPA sebanyak 17 orang anak didik. Sedangkan rasio peserta didik:pendidik paling banyak ditempati TK dengan 1 pendidik : 13 orang peserta didik dan yang terendah TPA dengan 1 pendidik : 8 orang peserta didik.

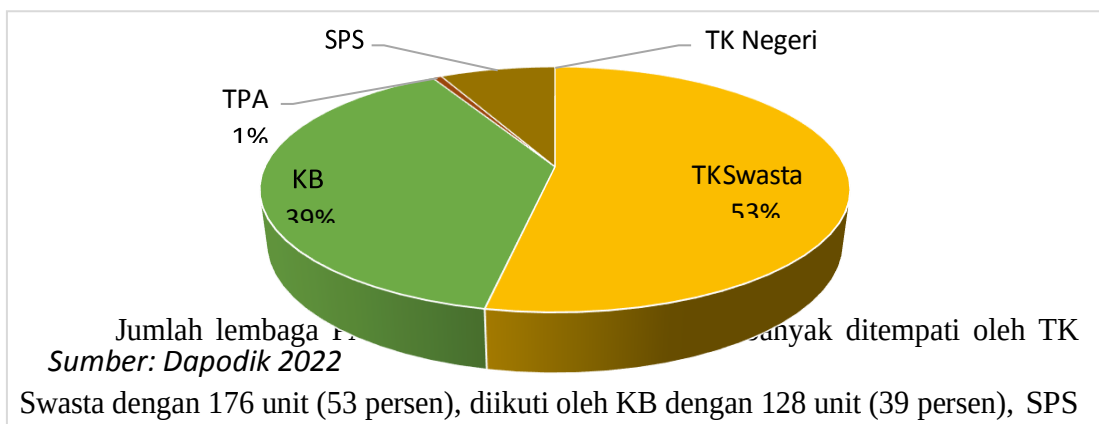
Tabel 4.5. Rasio Pendidikan pada jenjang PAUD Kabupaten Bekasi Tahun 2022

Jenis	Rasio Jumlah Peserta didik :	Rasio Jumlah Peserta Didik :	Jumah Pendidik : Jumlah Lembaga
TK	41	13	3
KB	26	12	2
TPA	17	8	2
SPS	25	11	2

Sumber: Dapodik 2022

Rasio jumlah pendidik pada setiap lembaga relatif seimbang yaitu 2-3 pendidik pada setiap jenis PAUD, hanya TK yang memiliki rasio paling tinggi yaitu 1 TK memiliki 3 orang pendidik, sedangkan KB, TPA dan SPS 1 lembaga memiliki 2 orang pendidik. Pada tahun 2022 dari 1,361 lembaga, baru 331 lembaga yang sudah masuk dalam kelompok PAUD holistik integratif. Program Holistik Integratif merupakan penanganan anak usia dini secara utuh/menyeluruh yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan serta perlindungan untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak usia dini.

Gambar 4.1. Proporsi Lembaga PAUD Holistik Integratif Kabupaten Bekasi Tahun 2022



dengan 25 unit (7 persen) dan TPA dengan 2 unit (1 persen). Belum ada TK negeri yang

masuk dalam kategori PAUD holistik integratif pada tahun 2022.

2. Pendidikan Dasar dan Menengah

a. Jumlah Sekolah

Pada tahun 2022 jumlah SD di Kabupaten Bekasi sebanyak 986 sekolah, SMP 346 sekolah, SMA 125 sekolah dan SMK 187 sekolah. Seluruh kecamatan telah memiliki minimal 1 sekolah baik pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah. Jumlah SD terbanyak terdapat di Kecamatan Tambun Selatan dengan 100 sekolah dan yang terendah di Kecamatan Bojongmangu dengan 15 sekolah. Pada jenjang SMP jumlah SMP terbanyak di Kecamatan Tambun Selatan dengan 56 sekolah dan yang terendah di Kecamatan Bojongmangu.

Tabel 4.6. Jumlah Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Menurut Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Sekolah Dasar			SMP		
		Negeri	Swasta	Total	Negeri	Swasta	Total
1	Babelan	45	14	59	5	21	26
2	Bojong Mangu	15	0	15	2	0	2
3	Cabangbungin	26	3	29	3	9	12
4	Cibarusah	27	10	37	6	12	18
5	Cibitung	38	11	49	8	8	16
6	Cikarang Barat	45	22	67	4	14	18
7	Cikarang Pusat	20	11	31	3	5	8
8	Cikarang Selatan	24	24	48	5	15	20
9	Cikarang Timur	30	5	35	5	4	9
10	Cikarang Utara	57	32	89	6	26	32
11	Karang Bahagia	28	8	36	3	6	9
12	Kedung Waringin	26	3	29	2	5	7
13	Muara Gembong	21	2	23	3	3	6
14	Pebayuran	50	5	55	3	4	7
15	Serang Baru	24	25	49	2	14	16
16	Setu	34	21	55	6	18	24
17	Sukakarya	21	2	23	1	9	10
18	Sukatani	25	11	36	2	6	8
19	Sukawangi	18	2	20	2	5	7
20	Tambelang	16	2	18	3	2	5

21	Tambun Selatan	64	36	100	13	43	56
22	Tambun Utara	28	14	42	6	9	15
23	Taruma Jaya	26	15	41	3	12	15
TOTAL		708	278	986	96	250	346

Sumber: Dapodik 2022

Pada jenjang SD mayoritas sekolah merupakan sekolah negeri 708 sekolah dan 278 sekolah merupakan SD swasta, pada jenjang SMP kondisi SMP swasta menjadi yang terbanyak dengan 250 sekolah sedangkan SMP negeri hanya 96 sekolah. Pada jenjang SMA, SMK dan SLB sekolah lebih banyak berstatus swasta dibandingkan dengan sekolah negeri.

**Tabel 4.7. Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal Kabupaten Bekasi
Menurut Tahun 2022**

No	Kecamatan	Kursus	PKBM	SKB
1	Babelan	1	4	0
2	Bojong Mangu	0	1	0
3	Cabangbungin	0	0	0
4	Cibarusah	0	2	0
5	Cibitung	1	3	0
6	Cikarang Barat	0	2	1
7	Cikarang Pusat	1	2	0
8	Cikarang Selatan	1	2	0
9	Cikarang Timur	0	4	0
10	Cikarang Utara	1	2	0
11	Karang Bahagia	0	3	0
12	Kedung Waringin	0	3	0
13	Muara Gembong	143	1	0
14	Pebayuran	0	2	0
15	Serang Baru	0	1	0
16	Setu	0	5	0
17	Sukakarya	0	1	0
18	Sukatani	1	5	0
19	Sukawangi	0	1	0
20	Tambelang	0	1	0
21	Tambun Selatan	11	9	0
22	Tambun Utara	1	3	0
23	Taruma Jaya	0	2	0
Total		161	59	1

Sumber: Dapodik-diakses pada November 2022

Pada tahun 2022 jumlah lembaga non formal di Kabupaten Bekasi paling banyak berjenis lembaga kursus sebanyak 161 lembaga, PKBM sebanyak 59 lembaga dan SKB sebanyak 1 lembaga. Lembaga kursus paling banyak di Kecamatan Muara Gembong.

b. Jumlah Guru

Jumlah guru di Kabupaten Bekasi tahun 2022 sebanyak 23,563 orang, jumlah tersebut paling banyak ditempati oleh guru SD dengan 13,140 orang atau 55.77 persen, diikuti guru SMP dengan 5,375 orang atau 22.81 persen, guru SMK dengan 2,599 orang atau 11.03 persen dan guru SMA dengan 2,449 orang.

Tabel 4.8. Jumlah Guru di Kabupaten Bekasi Menurut Jenjang dan Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan				
		SD	SMP	SMA	SMK
1	Babelan	1,004	427	169	205
2	Bojongmangu	124	37	26	7
3	Cabangbungin	237	143	49	43
4	Cibarusah	458	230	92	127
5	Cibitung	793	274	65	73
6	Cikarang Barat	931	329	111	327
7	Cikarang Pusat	329	95	82	101
8	Cikarang Selatan	756	315	146	138
9	Cikarang Timur	325	198	44	38
10	Cikarang Utara	1,359	507	243	191
11	Karangbahagia	417	105	41	107
12	Kedungwaringin	294	88	44	69
13	Muara Gembong	215	74	54	26
14	Pebayuran	484	168	84	64
15	Serang Baru	590	176	59	51
16	Setu	565	279	62	156
17	Sukakarya	257	80	34	22
18	Sukatani	381	126	108	75

19	Sukawangi	220	103	67	27
20	Tambelang	196	75	52	47
21	Tambun Selatan	1,953	1,088	616	405
22	Tambun Utara	713	253	124	172
23	Tarumajaya	539	205	77	128
	Total	13,140	5,375	2,449	2,599

Sumber: Dapodik-diakses pada November 2022

Jumlah guru SD paling banyak bertugas di Kecamatan Tambun Selatan dengan 1,953 orang dan yang paling sedikit di Kecamatan Bojongmangu dengan 124 orang guru. Pada jenjang SMP, Kecamatan dengan jumlah guru terbanyak ditempati oleh Kecamatan Tambun Selatan dengan 1,088 orang sedangkan pada jenjang SMA dan SMK ditempati Kecamatan Tambun Selatan dengan 616 orang dan 405 orang.

c. Jumlah Murid

Jumlah murid SD Kabupaten Bekasi pada tahun 2022 sebanyak 312,248 orang, murid SMP sebanyak 117,597 orang, murid SMA sebanyak 49,168 orang dan murid SMK sebanyak 66,216 orang.

Tabel 4.9. Jumlah Murid di Kabupaten Bekasi Menurut Jenjang dan Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Murid			
		SD	SMP	SMA	SMK
1	Babelan	22,016	9,360	4,039	5,272
2	Bojongmangu	2,289	641	582	167
3	Cabangbungin	5,332	2,096	1,136	1,139
4	Cibarusah	11,509	5,311	2,264	3,805
5	Cibitung	20,344	7,335	1,586	1,429
6	Cikarang Barat	22,190	7,264	1,907	8,252
7	Cikarang Pusat	7,235	2,111	1,854	2,407
8	Cikarang Selatan	19,896	6,536	2,660	4,118
9	Cikarang Timur	9,168	4,164	872	1,153
10	Cikarang Utara	32,888	10,392	4,124	4,805

11	Karangbahagia	10,153	2,435	945	2,918
12	Kedungwaringin	7,596	2,827	986	1,722
13	Muara Gembong	3,888	1,397	1,009	231
14	Pebayuran	10,570	3,747	1,738	1,352
15	Serang Baru	17,522	4,339	1,370	1,354
16	Setu	15,612	5,635	1,431	3,623
17	Sukakarya	4,418	1,610	977	1,111
18	Sukatani	9,106	3,350	2,270	2,373
19	Sukawangi	4,325	2,149	769	594
20	Tambelang	3,936	1,779	882	1,071
21	Tambun Selatan	43,580	22,570	11,825	11,122
22	Tambun Utara	16,714	6,426	2,528	3,311
23	Tarumajaya	11,961	4,123	1,414	2,887
	Total	312,248	117,597	49,168	66,216

Sumber: Dapodik 2022

d. Rombongan Belajar

Jumlah rombongan belajar di Kabupaten Bekasi paling banyak pada jenjang SD dengan jumlah rombel 11,198 rombel, diikuti oleh SMP dengan 3,548 rombel dan SMK dengan 2,281 rombel.

Tabel 4.10. Jumlah Rombel di Kabupaten Menurut Jenjang dan Kecamatan Tahun 2022

No	Wilayah	Jumlah Rombel				
		SD	SMP	SM	SM	SL
1	Tambun Selatan	1,543	669	363	385	50
2	Cikarang Utara	1,144	312	134	161	0
3	Babelan	823	278	124	181	0
4	Cikarang Barat	805	216	69	266	12
5	Cikarang Selatan	656	210	91	127	0
6	Cibitung	691	204	48	65	11
7	Tambun Utara	598	192	75	128	25
8	Setu	520	181	45	137	0
9	Serang Baru	574	132	49	47	11
10	Cibarusah	407	162	70	125	19
11	Taruma Jaya	466	135	51	92	0
12	Pebayuran	416	102	54	44	0
13	Sukatani	328	93	68	83	0
14	Karang Bahagia	357	72	31	98	0

Sumber: Dapodik, 2022	15	Cikarang Timur	312	126	29	41	0
	16	Cikarang Pusat	288	75	57	83	0
	17	Kedung Waringin	258	85	30	65	0
	18	Cabangbungin	210	72	30	40	0
	19	Sukakarya	186	54	28	38	0
	20	Sukawangi	189	62	27	22	0
	21	Tambelang	155	52	30	33	0
	22	Muara Gembong	173	43	33	13	0
	23	Bojong Mangu	99	21	18	7	0
		Total	11,198	3,548	1,554	2,281	128

ada jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan SLB jumlah rombel paling banyak terdapat di Kecamatan Tambun Selatan dengan 1,543 rombel pada jenjang SD, 669 rombel pada jenjang SMP, 363 rombel pada jenjang SMA, 385 rombel pada jenjang SMA dan 50 rombel pada jenjang SLB.

3. Rasio Pendidikan

a. Rasio Murid per Sekolah

Rasio murid per sekolah paling banyak pada jenjang SMA yaitu 1 sekolah rata-rata berisi 393 orang peserta didik, diikuti oleh jenjang SMK dengan 354 orang peserta didik dan jenjang SMP dengan 340 orang peserta didik.

Tabel 4.11. Rasio Murid: Sekolah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Menurut

Jenjang Pendidikan

Jenjang	Peserta Didik	Sekolah	Rasio
SD	312,234	986	317
SMP	117,572	346	340
SMA	49,179	125	393
SMK	66,216	187	354
SLB	724	10	72

Sumber: Dapodik 2022

b. Rasio Guru : Murid

Rasio murid dan guru di Kabupaten Bekasi paling tinggi pada jenjang SD yaitu 1 guru berbanding 24 orang peserta didik dan yang terendah pada jenjang SLB yaitu 1 orang guru berbanding 9 orang peserta didik.

Tabel Rasio 4.12. Murid:Guru Kabupaten Bekasi Tahun 2022

Jenjang	Peserta Didik	Guru	Rasio	Menurut Jenjang Pendidikan
SD	312,234	13,140	24	
SMP	117,572	5,375	22	
SMA	49,179	2,449	20	
SMK	66,216	2,599	25	
SLB	724	84	9	

Pendidikan

Sumber: Dapodik 2022

Pada SPM disebutkan bahwa setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik hal ini menggambarkan bahwa proporsi guru terhadap dengan peserta didik di Kabupaten Bekasi sudah sangat baik. Satu orang guru hanya membimbing 24 orang pesertadidik.

c. Rasio Rombel : Siswa

Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar paling tinggi ditempati oleh SMP dengan 1:33 orang sedangkan yang paling kecil ditempati oleh SLB dengan 1:6 orang. Angka ini masih di bawah SPM yaitu jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang.

Tabel 4.13. Rasio Rombel:Siswa Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Menurut

Jenjang Pendidikan

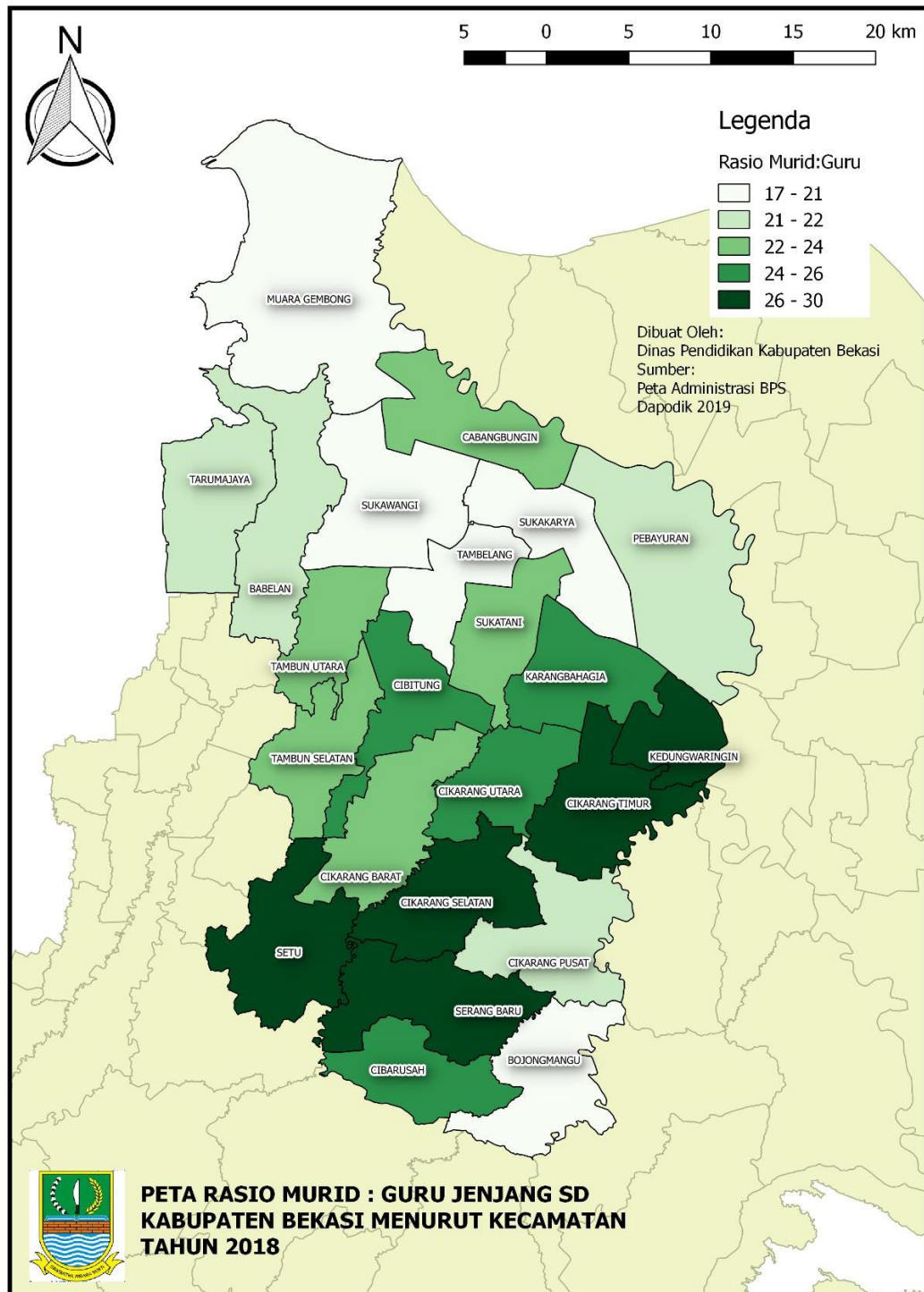
Jenjang	Rombel	Peserta Didik	Rasio
SD	11,198	312,234	28
SMP	3,548	117,572	33
SMA	1,554	49,179	32
SMK	2,281	66,216	29
SLB	128	724	6

Sumber Dapodik 2022

Gambar 4.2.

PETA RASIO GURU JENJANG SD

❖ **Peta Rasio Guru Jenjang SD**

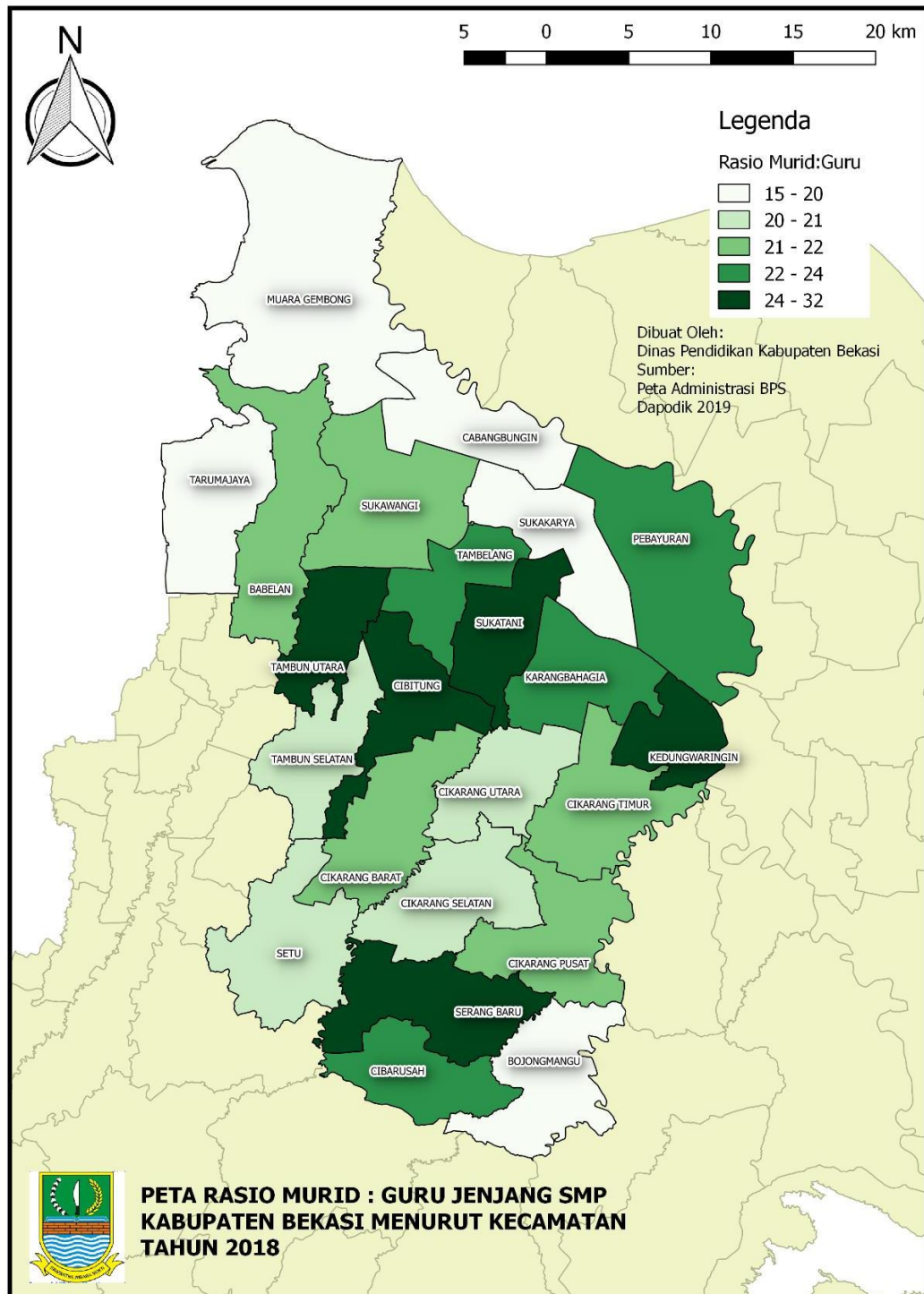


Sumber Ensiklopedia Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi

Gambar 4.3.

PETA RASIO GURU JENJANG SMP

❖ Peta Rasio Guru Jenjang SMP



Sumber Ensiklopedia Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Gambaran Peran Dinas Pendidikan Dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabuapten Bekasi

Berdasarkan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 Tentang “ Program Indonesia Pintar “ dan Persesjen Nomor 14 Tahun 2022 Tentang “ Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah “, bahwa peran atau tugas dari Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota terkait dengan Program Indonesia Pintar adalah :

1. Mengusulkan Peserta Didik calon penerima PIP dari satuan pendidikan di wilayahnya;
2. Melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan PIP di wilayahnya;
3. Menghimpun dan melayani pengaduan masyarakat di wilayahnya;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PIP di wilayahnya; dan
5. Melaksanakan tugas dan wewenang lain dalam pengelolaan PIP di kabupaten/kota sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil wawancara dengan Dr.H.Carwinda,M.Si (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi) bahwa:

“Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan sudah melakuakn pengusulan peserta didik penerima PIP di kabupaten bekasi melalui usulan dinas pendidikan setiap tahunnya, Dinas Pendidikan sudah melaksanakan sosialisasi pelaksanaan PIP ke satuan pendidikan di

wilayah Kabupaten Bekasi, Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan PIP di Kabupaten Bekasi”.

Narasumber yang bernama Kusuma Ridwan, M.Pd (Kepala Bidang Pembinaan SMP) menyatakan bahwa:

“Kalau Dinas Pendidikan Bidang Pembinaan SMP pada khususnya selalu melakukan Sosialisasi setiap tahunnya berdasarkan anggaran yang ada pelaksanaan PIP di Kabupaten Bekasi.”

Selanjutnya Badru Iskandar, S.Pd (Kepala Seksi Peserta Didik dan Pendidikan Karakter SMP), menyatakan:

“Dinas Pendidikan sudah berkoordinasi dengan Dinas terkait dalam pelaksanaan PIP jenjang SMP di Kabupaten Bekasi sesuai dengan ketentuan Persesjen Nomor 14 Tahun 2022.”

Kemudian Muhammad Rustiana Malik, S.Pd (Operator Dinas PIP SMP) menjawab sebagai berikut:

“ Sudah adanya penangan seputar permasalahan Pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Kabupaten Bekasi sehingga masyarakat dapat mengadu dan memperoleh informasi yang akurat terkait pelaksanaan PIP di Kabupaten Bekasi jenjang SMP.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi sudah melaksanakan perannya dalam pelaksanaan PIP yang mengacu kepada ketentuan pusat dalam Persesjen nomor 14 Tahun 2022, namun masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya.

4.2.2 Faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) Jenjang SMP di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat

Maksimal atau tidaknya peran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) jenjang SMP tidak terlepas dari factor – factor yang mendukung maupun yang menghambatnya, seperti yang diungkapkan Bapak Dr.H.Carwinda,M.Si (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi) dari hasil wawancara sebagai berikut :

“Dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Kabupaten Bekasi Dinas Pendidikan sudah adanya acuan yaitu Permendikbud nomor10 tahun 2020 dan persején nomor 14 tahun 2022, sesuai dengan ketentuan Puslapdik Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam melaksanakan Program Indonesia Pintar di Kabupaten/Kota, tetapi dalam perjalannya Masih saja ada hambatan-hambatan dalam pelaksanaan PIP Jenjang SMP seperti; masih banyaknya data usulan dari sekolah yang tidak sesuai dengan kelayakan, anggaran yang masih terbatas untuk melakukan sosialisasi ke satuan-satuan pendidikan binaan serta pihak Bank penyalur yang belum memberikan akses lebih bagi proses Aktivasi maupun pencairan dana PIP”.

Kemudian hasil wawancara dengan Kusuma Ridwan, M.Pd (Kepala Bidang Pembinaan SMP) menyatakan bahwa:

“ Puslapdik selaku pelaksana Program Indonesia Pintar di Indonesia selalu mengadakan workshop maupun sosialisai yang bersipat rutin untuk menambah informasi dan perkembangan Program Indonesia Pintar untuk

mendukung dalam pelaksana di tingkat Kabupaten atau Kota, namun kendala yang bersifat teknis dan non teknis masih ada seperti; data – data usulan dari sekolah yang tidak diisi dengan benar, anggaran masih terbatas serta masih adanya masalah pelayanan dari Bank penyalur yang masih menyatukan nasabah PIP dengan Nasabah biasa”.

Begitu juga hasil wawancara dengan Tim Pengelola PIP Dinas Pendidikan yang lainnya ketiga permasalahan di atas masih menjadi factor penghambat dalam pelaksanaan PIP Jenjang SMP oleh Dinas Pendidikan di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.

Adapun hasil wawancara dengan pihak sekolah dalam hal ini Kepala Sekolah yang menjadi penanggungjawab dari pelaksanaan PIP jenjang SMP di sekolahnya masing-masing selain dari ketiga hal yang disampaikan oleh pengelola PIP Tingkat Kabupaten ada kendala lainnya seperti yang di sampaikan oleh Bapak Unang Permana, S.Pd (Kepala Sekolah SMPN 2 Tambun Selatan) beliau menyampaikan bahwan;

“ Pelaksanan Program Indonesia Pintar di Sekolah jenjang SMP selain sudah ada acuan dari permendikbud nomor 10 tahun 2020 dan persesjen nomor 14 tahun 2022, adanya sosialisai dari Dinas Pendidikan yang sudah rutin setiap tahun sekali membantu kami di satuan pendidikan dalam pelaksanaan PIP dan pelayanan kepada masyarakat, tetapi masih ada hambatan pelaksanaan PIP Jenjang SMP di sekolahnya selain dari masih adanya data usulan calon penerima PIP yang tidak sesuai, pelayanan nasabah PIP di Bank Penyalur, belum adanya anggaran khusus

untuk tim pengelola PIP Sekolah lamanya update data penyerapan PIP pada Aplikasi SIPINTAR di satuan Pendidikan menjadi salah satu hambatan yang hampir semua sekolah rasakan”.

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Nata, S.Pd,M.M (Kepala Sekolah SMP Darrurohman) dalam wawancara dengan beliau yakni;

“ Adanya keharusan pembentukan tim pengelola PIP di satuan pendidikan berdasarkan acuan di persesjen nomor 14 tahun 2022 memudahkan pembagian peran dalam pelaksanaan PIP di satuan pendidikan, walaupun kendala seperti data siswa usulan PIP baru masih saja ada yang bermasalah seperti NIK tidak valid, serta tidak ada alokasi anggaran khusus di sekolah untuk mendukung kinerja tim masih menjadi kendala di sekolah kami”.

4.2.3 Strategi Peningkatan Peran yang sudah dilaksanakan Dinas Pendidikan Dalam Pelaksanaan PIP Jenjang SMP di Kabupaten Bekasi.

Dalam pelaksanaan PIP Jenjang SMP di kabupaten Bekasi, perlu adanya sosialisasi dan pengarahan kepada satuan pendidikan khususnya jenjang SMP agar melakukan peran satuan pendidikan terkait dalam pelaksanaan PIP sesuai dengan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 dan Persesjen Nomor 14 Tahun 2022, peran satuan pendidikan tersebut diantaranya; mengusulkan peserta didik calon penerima pip sesuai dengan persyaratan; melakukan sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan PIP pada satuan pendidikan; dan membantu kelancaran proses aktivasi rekening dan/atau penarikan dana PIP peserta didik penerima di satuan pendidikan.

Tepatnya sasaran penerima bantuan PIP bagi siswa-siswi yang memang membutuhkan sangat ditentukan oleh peran dari satuan pendidikan sebagai pengusul awal melalui DAPODIK sekolahnya masing-masing dan juga Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota yang dalam hal ini sebagai Pembina di semua satuan pendidikan yang berada di wilayahnya masing-masing, dikarenakan berfungsinya peran yang berkesesuaian dengan peraturan yang berlaku bagi Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dalam hal ini dalam menjalankan perannya pada pelaksanaan PIP khususnya jenjang SMP di Kabupaten Bekasi sesuai dengan Persesjen Nomor 14 Tahun 2022.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi memiliki upaya dalam perannya tersebut yang dituangkan pada kegiatan rutin tahunan dengan penyerapan anggaran (APBD) dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pelayanan pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang SMP yang berhubungan dengan kegiatan; sosialisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Hasil wawancara penulis kepada narasumber penelitian mengenai upaya untuk meningkatkan Peran Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan PIP Jenjang SMP di Kabupaten Bekasi berikut ini.

Hasil wawancara dengan Dr.H.Carwinda,M.Si (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi) bahwa: *“Dinas Pendidikan melalui DPA selalu menganggarkan kegiatan untuk Sosialisasi dan Evaluasi baik yang bersifat rutin maupun isidental terkait penyampaian pelaksanaan Program Indonesia Pintar ke satuan pendidikan dan melalui Musrembang di kecamatan wilayah kabupaten Bekasi serta dibuatkannya sarana-sarana online di dalam menampung*

pengaduan dan permasalahan terkait pelaksanaan PIP di semua Jenjang serta di tetapkannya Surat Keputusan Tim Pengelola PIP Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi update setiap tahunnya”.

Narasumber yang bernama Kusuma Ridwan, M.Pd (Kepala Bidang Pembinaan SMP) menyatakan bahwa:

“Kalau Dinas Pendidikan Bidang Pembinaan SMP pada khususnya selalu melakukan Sosialisasi terkait informasi penyelenggaraan PIP jenjang SMP kepada satuan Pendidikan melalui kegiatan dengan menghadirkan narasumber dari kementrian (PUSLAPDIK) yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan PIP di Indonesia.”

Selanjutnya Badru Iskandar, S.Pd (Kepala Seksi Peserta Didik dan Pendidikan Karakter SMP), menyatakan: *“adanya pembentukan Tim Pengelola PIP Dinas jenjang SMP sesuai dengan ketentuan Persesjen Nomor 14 Tahun 2022.”*

Kemudian Muhammad Rustiana Malik, S.Pd (Operator Dinas PIP SMP) menjawab sebagai berikut:

“Kalau penyampaian informasi terkait PIP dan seputar permasalahannya sudah di buatkan group-group WA dan Instagram yang berisikan operator PIP sekolah negeri maupun swasta dan juga ada group komunikasi dengan pihak Bank Penyalur (BRI) baik cabang maupun pusat. ”

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber tersebut, bahwa peran Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dalam Pelaksanaan PIP yang sudah dilakukan diantaranya; membuat penganggaran kegiatan sosialisasi tahunan,

pembentukan Tim Pengelola PIP Dinas Pendidikan, membuat simpul-simpul pelayanan informasi terkait dengan pelaksanaan PIP dan melakukan monitoring tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan – hambatan yang harus dicarikan pemecahannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.Kesimpulan

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dan analisis yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan dan juga merupakan jawaban pertanyaan penelitian yang telah diajukan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengusulkan Peserta Didik calon penerima PIP dari satuan pendidikan di wilayahnya

Data yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan harus sesuai dengan kelayakannya berdasarkan kriteria yang tertuang dalam Persesjen Nomor 14 Tahun 2022 Tentang “ Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah “, dimana peran Dinas Pendidikan diharapkan bisa mengakomodir usulan penerima PIP dari satuan pendidikan yang memang benar -benar dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan pedoman dan petunjuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar.

Data yang diusulkan tersebut harus diukur berdasarkan:

- Status orang tua sebagai penerima program bantuan Kesejahteraan Sosial Pemerintah (DTKS).
- Kelengkapan kedua orang tua (Anak Yatim).
- Kelayakan besaran penghasilan orang tua.

- Keabsahan data peserta didik yang diperlukan (NIK, NISN, Nama Orang Tua).
- Memaksimalkan kuota usulan penerima PIP yang diberikan oleh pusat tahun berjalan.

Peran Dinas Pendidikan melakukan proses mengusulkan peserta didik calon penerima PIP dari satuan pendidikan di wilayahnya, berupa agenda-agenda tahunan yang selalu dijalankan oleh Dinas Pendidikan yang berkesesuaian dengan anggaran yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya yang tertuang dalam kegiatan Sosialisasi dan Evaluasi Program Indonesia Pintar dengan peserta seluruh satuan pendidikan yang berada di bawah binaan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Namun kontribusi tersebut belum berdampak secara massif ke satuan-satuan pendidikan yang berada dibawah binaan Dinas Pendidikan kabupaten Bekasi terutama di bidang SMP.

2. Melakukan Sosialisasi dan koordinasi Pelaksanaan PIP di wilayahnya.

Dalam pemberian kontribusi kepada satuan pendidikan yang berada di bawah binaan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, sosialisasi regulasi dan tatacara pelaksanaan yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh satuan – satuan pendidikan yang sesuai dengan Persesjen Nomor 14 Tahun 2022 haruslah secara massif dan dapat dijalankan dengan maksiamal oleh satuan-satuan penddikan (SMP).

Oleh karena itu informasi atau materi yang disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi tersebut harus memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Materi yang disampaikan.
- b. Narasumber atau pemateri Sosialisasi Pelaksanaan PIP SMP.
- c. Sasaran Peserta Sosialisasi Pelaksanaan PIP.
- d. Manfaat yang diterima oleh peserta dari hasil Sosialisasi Pelaksanaan PIP SMP.
- e. Follow Up dari hasil Kegiatan.

Sosialisasi Pelaksanaan PIP jenjang SMP sudah dapat dikatakan sangat baik, hal ini dapat dilihat; Materi, Narasumber atau Pemateri Sosialisasi Pelaksanaan PIP SMP yang sesuai keahliannya, namun ketepatan sasaran peserta undangan, kebermanfaatan dari kegiatan sosialisasi, dan tindak lanjut atau follow up dari kegiatan sosialisasi tersebut masih sangat perlu ditingkatkan lagi untuk membantu pelaksanaan PIP jenjang SMP agar terlaksana dengan maksimal.

3. Menghimpun dan melayani pengaduan masyarakat di wilayahnya.

Proses pemberian pelayanan publik pada dasarnya harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi organisasi yang benar dan telah ditetapkan. Keandalan (*reliability*) adalah kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan secara konsisten dan akurat. Hal ini penting mengingat masyarakat membutuhkan pembuktian dari janji-janji pelayanan. Indikator keandalan (*reliability*) dalam upaya untuk mengetahui kualitas pelayanan Pelaksanaan PIP jenjang SMP di Kabupaten Bekasi dapat diukur berdasarkan:

- a. Pengelola PIP Tingkat Kabupaten Jenjang SMP merespon permasalahan Pelaksanaan PIP di wilayah Kabupaten Bekasi.

- b. Proses respon permasalahan Pelaksanaan PIP yang cepat.
- c. Kemudahan layanan informasi Pelaksanaan PIP.
- d. Pengelola PIP selalu siap sedia saat diperlukan.
- e. Pengetahuan dan keterampilan Pengelola PIP Tingkat Kabupaten dalam memberikan layanan.

Kualitas pelayanan pengaduan masyarakat dapat dikatakan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan secara konsisten dan akurat oleh pengelola PIP Dinas Pendidikan Jenjang SMP, ketanggapan pengelola PIP terhadap permasalahan PIP sudah cukup baik, respon yang diberikan selama pelayanan cukup cepat tergantung dari seberapa tingkat permasalahannya, menurut beberapa informan memberikan tanggapan kalau dalam mendapatkan pelayanan dari Pengelola PIP Dinas cukup cepat dan sesuai dengan yang diharapkan. Akan tetapi kesiapan pengelola setiap kali dibutuhkan masih perlu diperbaiki karena masih terbatasnya SDM yang ada.

4. Melakukan pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan PIP diwilayahnya.

Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan PIP Jenjang SMP di Kabupaten Bekasi oleh Dinas Pendidikan dapat diukur berdasarkan:

- a. Pengelola PIP SMP Dinas harus secara berkala melakukan pemantauan.
- b. Wadah atau tempat komunikasi antara Pengelola PIP SMP Dinas dengan Pengelola PIP Satuan Pendidikan.
- c. Wadah atau tempat komunikasi antara Pengelola PIP SMP Dinas dengan Pihak Bank Penyalur.

- d. Update data perkembangan penyerapan PIP per tahun.
- e. Memberikan rambu-rambu kepada satuan pendidikan yang tidak melaksanakan pelayanan PIP SMP.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PIP jenjang SMP sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dengan adanya pemantauan dan evaluasi dari pelaksanaan PIP jenjang SMP oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi yang selalu mengupdate data perkembangan dan penyerapan pelaksanaan PIP setiap tahunnya yang dianggap sangat perlu bagi satuan pendidikan dan masyarakat dengan mendapat informasi yang akurat sehingga pelaksanaan PIP bisa tepat sasaran dan bermanfaat bagi siswa-siswi jenjang SMP yang membutuhkan bantuan PIP tersebut.

Permasalahannya Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PIP jenjang SMP Tersebut belum dilaksanakan secara rutin dan hanya bersifat insidental kasus per kasus.

5. Melaksanakan tugas dan wewenang lain dalam pengelolaan PIP SMP di Kabupaten Bekasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudahan dan kejelasan dalam memberikan pelayanan pengelolaan PIP SMP sesuai dengan kebutuhan masyarakat merupakan hal yang penting. Peran Dinas Pendidikan Kabupaten sebagai Pembina kepada satuan-satuan pendidikan yang berada di wilayahnya dengan melakukan pemberian pelayanan yang baik.

Dengan mengacu kepada Persesjen Nomor 14 Tahun 2022 walaupun tidak secara eksplisit dicantumkan peran tambahan lainnya dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam hal pelaksanaan PIP SMP di Kabupaten Bekasi.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi memberikan pelayanan pembinaan berupa pendampingan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh satuan pendidikan dalam pelaksanaan PIP SMP dan dapat dilihat berdasarkan:

- a. Pengelola PIP Dinas melakukan Pendampingan kepada satuan Pendidikan dalam penyelesaian masalah PIP SMP.
- b. Pengelola PIP Dinas mampu memberikan Pendampingan yang baik.
- c. Pengelola PIP Dinas bersikap adil dan tidak membeda-bedakan satuan pendidikan Negeri maupun Swasta.
- d. Perhatian Pengelola PIP Dinas secara khusus kepada Satuan Pendidikan yang Bermasalah.

Pengelolaan PIP SMP di Kabupaten Bekasi sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini dapat dilihat dari system pengelolaan PIP Dinas Pendidikan bersikap adil dan tidak membeda-bedakan sekolah negeri maupun swasta. Sehingga pelayanan pelaksanaan PIP oleh Dinas Pendidikan terkait dengan perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten Bekasi bisa memberikan rasa berkeadilan dan kesetaraan pelayanan kepada semua satuan pendidikan binaannya baik sekolah negeri maupun swasta.

Masih adanya pelanggaran dan penyalahgunaan pengelolaan PIP oleh satuan pendidikan di Kabupaten Bekasi yang terkait masalah hukum menunjukan

perlu adanya tim pendampingan yang bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah hukum tersebut.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka dari hasil penelitian ini peneliti mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Harus adanya penanggungjawab wilayah per kecamatan terkait keabsahan data calon penerima PIP SMP yang sesuai dengan kriteria pada Persesjen Nomor 14 Tahun 2022.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi harus menambah anggaran dan sumber daya manusia agar dapat memaksimalkan perannya dalam pelaksanaan PIP Jenjang SMP dalam melakukan Sosialisasi dan Koordinasi serta membuat wadah koordinasi dengan Dinas-dinas terkait yang memang mendukung terhadap Pelaksanaan PIP SMP, yang diprakarsai langsung oleh Kepala Dinasnya masing-masing bahkan harus samapai kepada Kepala Daerah Kabupaten Bekasi..
3. Perlu ditambahkan link-link konsultasi serta tim PIP Dinas Pendidikan dalam pelayanan Pengaduan permasalahan PIP dari masyarakat sehingga bisa dengan cepat memberikan penyelesaian .
4. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi harus membuat program pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan PIP Jenjang SMP secara rutin.
5. Harus adanya Tim Advokasi bantuan hukum yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi yang bisa membantu penanganan masalah-

masalah hukum dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) Tingkat SMP.

DAFTAR PUSTAKA

Delly Mustafa, *“Birokrasi Pemerintahan Edisi Revisi”*. Bandung; Alfabeta, 2018.

Eric Zakaria, “Peran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Di Kabupaten Cilacap Tahun 2017” Tesis S-2 Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018.

Ermaya Suradinata, *“Etika Pemerintahan Dan Geopolitik Indonesia”*. Bandung; AlqaprintJatinangor, 2021.

Koswara Kertapraja, *“Pemerintah Daerah Konfigurasi Politik dan Otonomi Daerah Dulu, Kini dan Tantangan Globalisasi”*. Jakarta; Yayasan Damandiri, 2015.

Nyoman Sumaryadi, *“Sosiologi Pemerintahan Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia”*. Bogor; Ghalia Indonesia, 2013.

Nur Azizah, *“Implementasi Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Di Sma Negeri 17 Bone Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone” Skripsi S-1 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.*

Sugiyono, “ *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*” .Bandung;
Alfabeta Cv, 2020.

Kampus STIP-AN, “*Buku Pedoman Penyusunan Tesis Program Pascasarjana
Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara*” Jakarta;STIP-
AN, 2014.

Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan
Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, “*Buku
Panduan Kegiatan Workshop Koordinasi dan Evaluasi Region I
Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2019*”
Jakarta;PUSLAPDIK, 2019.

Dokumen :

Permendikbud No 10 Tahun 2010; Tentang Program Indonesia Pintar

Persesjen Kemendikbudristek No.14 Tahun 2022; Tentang Petunjuk Pelaksanaan
PIP Dikdasmen.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Hasil Wawancara
- Lampiran 3 Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020
- Lampiran 4 Persesjen Nomor 14 Tahun 2022



SEKOLAH TINGGI ILMU PEMERINTAHAN ABDI NEGARA

Prodi Ilmu Pemerintahan: SK BAN-PT No. 2537 / SK / BAN-PT / Akred / S / IX / 2018, Terakreditasi Peringkat "B",
Prodi Ilmu Politik : SK BAN-PT No. 2534 / SK / BAN-PT / Ak-PPJ / S / IV / 2022, Terakreditasi Peringkat "B",

Kampus :

Jl. Lenteng Agung No. 37 A, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12610 Telp/Fax : (021) 786 7996, 788 906 72, 788 906 73
Website : www.stipan.ac.id E-mail : admin@stipan.ac.id



Jakarta, 14 September 2022

No : 712/STIPAN-AM/2022

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Bapak / Ibu Kepala Kesbampol Kabupaten Bekasi

Di

Kabupaten Bekasi

Dengan Hormat

Dalam Rangka Penyusunan Tesis Sebagai Salah Satu Syarat Kelulusan Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (PPs, MIP STIPAN) di Jakarta.

No	Nama	NPM	Judul	Pembimbing Ke 1	Pembimbing Ke 2
1	A. Munzir Muhamarram	20651010224	Strategi Intervensi Kepala Dinas Pendidikan Dalam Upaya Meningkatkan Motivasi Kerja Pegawai Di Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat	Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS	Dr. Drs. Rosidi, M.Si
2	Dedy Widjaya	20651010225	Strategi Intervensi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat	Dr. Sumarsono, MDM	Dr. Drs. Rosodi, M.Si
3	Evi Silvia	20651010226	Implementasi pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat	Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS	Dr. Drs. Rajanner P. Simarmata, M.Si
4	Iwan Syahrani	20651010228	Peran Dinas Pendidikan Dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (Pip) Jenjang Smp Di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat	Prof. Dr. Drs. I Nyoman Sumaryadi, BA, M.Si	Dr. Drs. Rajanner P. Simarmata, M.Si
5	Nurkholis	20651010229	Pengukuran Kinerja Pegawai Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat	Prof. Dr. Drs. I Nyoman Sumaryadi, BA, M.Si	Dr. Drs. Sofyan Safari Hamam, M.Si
6	Santi Sripujianti	20651010231	Implementasi Kebijakan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 440 Tahun 82020 Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Kabupaten Bekasi	Dr. Sumarsono, MDM	Dr. Drs. Sofyan Safari Hamam, M.Si

7	Muhammad Ali Amran	20651010237	Implementasi Kebijakan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Urusan Pemerintahan Bidang Umkm Dikecamatan Setu Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat	Dr. Sumarsono, MDM	Dr. Rosidi, M.Si
8	Fadly Marissatrio	20651010241	Strategi Intervensi Pemerintah Daerah Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat	Dr. Sumarsono, MDM	Dr. Drs. Rajanner P. Simarmata, M.Si

Dengan ini kami mohon agar Mahasiswa tersebut diberikan Izin untuk melakukan penelitian berupa Wawancara, Dokumentasi, Dan Data-Data Kuantitatif Maupun Kualitatif Pada Instansi di lingkungan yang Bapak / Ibu Pimpin.

Sehubungan hal tersebut diatas mohon berkenan untuk memberikan jawaban secara tertulis atas permohonan kami tersebut.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan
Abdi Negara
An. Ketua
Wakil Ketua


Dr. Sofyan Safari Haidim, M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Instagram: kesbangpolkabbekasi
Email: badankesbangpol.kab.bekasi@gmail.com

BEKASI

Bekasi, 08 November 2022

Kepada

Yth. **Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi**
di-

BEKASI

Nomor : HM.04.04/1049/Bakesbangpol/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Surat Keterangan Penelitian**

Menindaklanjuti surat dari Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, Nomor Surat: 712/STIPAN-A/IX/2022, tanggal 14 September 2022, perihal: Permohonan Izin Penelitian, berkenaan hal tersebut di atas dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **IWAN SYAHRONI**
Tempat/Tgl Lahir : Bekasi, 16-03-1979
NIM : 20651010228
Jenjang/ Program Studi : Magister (S-2) / Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan
Perguruan Tinggi / Universitas : Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara
Alamat Rumah : Kp. Bugel Salam RT/RW. 002/001 Kel/Desa Sertajaya
Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi
No. Telp/ HP / Email : 0878-8756-4588 / iwansyahroni73@gmail.com

Bermaksud akan mengadakan Penelitian, Pengumpulan Data dan Wawancara dalam rangka penyusunan Tesis dengan judul: **"PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) JENJANG SMP DI KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT"** yang akan dilaksanakan di lingkungan dan wilayah kerja Bapak/Ibu pimpin, adapun waktu pelaksanaan mulai tanggal **08 November 2022 s/d 08 Februari 2023**, apabila berkenan mohon kiranya kepada yang bersangkutan diberikan kemudahan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan sepanjang tempat penelitian memberikan izin;
2. Melaporkan kedatangan kepada Instansi dimaksud dengan menunjukkan surat ini;
3. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan tujuan akademik;
4. Apabila di atas tanggal **08 Februari 2023** kegiatan penelitian belum selesai, agar menyampaikan permohonan perpanjangan oleh instansi pemohon ditujukan kepada Pj. Bupati Bekasi cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bekasi;
5. Setelah selesai melaksanakan kegiatan penelitian wajib melaporkan hasilnya kepada Pj. Bupati Bekasi Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bekasi;
6. Surat ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas.

Demikian agar maklum terima kasih.



Tembusan: disampaikan kepada :

1. Yth. Pj. Bupati Bekasi (sebagai laporan);
2. Yth. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara.